KISAH SINGKAT SEORANG
SULAMI



LPKP-65

KISAH SINGKAT SEORANG SULAMI

KISAH SINGKAT SEORANG
SULAMI

Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 1965
(LPKP-65)

Diterbitkan oleh : LPKP-65
Untuk mengenang perjalanan hidup seorang perempuan pejuang yang telah mengabdikan hampir seluruh hidupnya dalam menegakkan kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

Desember 2002

DAFTAR ISI

KISAH SINGKAT SEORANG SULAMI 1

I. KELAHIRAN YPKP 65-66 4

II. DEKLARASI YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966 9

III. LAPORAN KEPADA KOMNAS HAM 12

IV SALAM HANGAT DARI LONDON 14

V. KEGIATAN YPKP 65/66 15

VI. TAMU KITA 19

VII. MASALAH DISKRIMINASI 24

VIII. PENGGALIAN KUBURAN MASSAL DI NDAPES. 32

IX SULAMI MENDAPAT AWARD 36

X. PERTEMUAN DI SUKABUMI, JAWA BARAT 40

XI. SOAL KONTRAK DENGAN HO, DI BELANDA 50

YAYASAN MENJELANG 6 AGUSTUS 2002 57

XII. PERKEMBANGAN YPKP 65/66 MENJADI LPKP-65 63

XIII. IBU SULAMI DIPANGGIL OLEH YANG MAHA KUASA 66

KISAH SINGKAT SEORANG SULAMI

Sulami putri dari Pak Dalyo Djoyoprawiro dengan ibu Marinah Suliyah lahir di Sragen, Jawa Tengah 15 Agustus 1926.

Tahun 1944 pada usia 18 tahun Sulami bersama dengan gadis lainnya terpaksa menjadi sukarelawati penjara Sragen. Sesudah proklamasi masuk Pemuda Putri Indonesia dan alih pekerjaan di P.G. Rojo Sragen. Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer kedua (Desember 1949) ia menggabungkan diri dengan TNI yang sempat melakukan long march dari Gunung Lawu sampai Mranggen 1950 masuk kota Kudus bersama Pasukan Komando Brigade "55" (Stoot Semarang)

Tahun 1951 masuk Gerwis (Gerakan Wanita Sedar) di Surabaya, cikal bakal Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang bersemboyan "Organisasi Perempuan dan Pendidikan".

Sebagai anggota pengurus Gerwani Jawa Timur tahun 1954. ia terpilih mengikuti estafet Pemuda dan Pelajar Sedunia di Bukares, Rumania. dan pada tahun 1957 terpilih sebagai wakil II sekjen DPP Gerwani.

Tahun 1958 mengikuti Kongres Wanita Sedunia di Wina, lalu ke Berlin Timur mewakili Gerwani dalam Women International Democration (Gabungan Wanita Demokratik Sedunia di Wina. Sejak itu kegiatan-kegiatan internasionalnya sempat padat, dan tahun 1964 aktif kembali di kepengurusan Gerwani yang akan menyelenggarakan kongres ke-V tanggal 27-29 Desember 1965. Perlu kami jelaskan bahwa Sulami di Forum Gerakan Wanita Demokratik Sedunia partisipasinya adalah sebagai Sekjen.

Dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965, ia dipaksa meninggalkan kantor yang menjadi tempat tinggalnya tanpa bekal apapun. Sejak itu ia berpindah-pindah tempat tinggal, sampai akhirnya ditangkap pada 6 Oktober 1967. Tahun 1980 ia ditahan di penjara Bukitduri. kemudian tahun 1984 dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Tahun 1975 diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sulami di jatuhi hukuman penjara 20 tahun, potong masa tahanan. dituduh melakukan makar/subversi. Tahun 1984 dibebaskan bersyarat dan wajib lapor ke kejakasaan sampai tahun 1986.

Tahun 1984 bebas bersyarat, bekerja pada sebuah perusahaan ketering dengan gaji 40.000 rupiah/bulan.

Setelah bebas, mulailah mengadakan kontak ke daerah-daerah bersama teman-temannya. Pada tahun 1994 selama 41 hari dalam 3 kali kunjungan kekeluargaan dan wawancara dengan ibu-ibu mantan Tapol G. 30 S tahun 1965 tentang pengalaman dalam penjara dan kehidupan setelah bebas tahun 1978. Ibu sulami pergi ke daerah-daerah. pertama kalinya mengunjungi daerah:

Magelang, Temanggung/Parakan, Purwokerto, Cilacap/Wangon., Semarang, Salatiga, Boyolali, Solo (Surakarta), Sragen, Yogyakarta, Klaten.

Kunjungan yang kedua kalinya yaitu ke daerah: Purwodadi, Boyolali, Yogyakarta, Wonosobo (hutan Situkub), Solo, Sragen. Dilanjutkan dengan kunjungan berikutnya yang ke tiga kalinya yaitu ke daerah: Surabaya, Madiun, Wonosobo. Sidoarjo, Malang. Dana yang dihabiskan dalam kunjungan ini tersebut sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta duaratus ribu rupiah)

Pada tahun 1995-1996 melakukan kunjungan ke daerah Plantungan, Yogyakarta, Sragen, Semarang, Purwodadi, Blora. Kunjungan kedua ini selama 10 hari dan menghabiskan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada periode tahun 1997-1998 melakukan kunjungan yang ketiga dengan mengunjungi daerah Boyolali, Solo, Sukoharjo, Blora dan Purwodadi. Lama kunjungan ini hanya satu minggu. Kunjungan ini juga sebagi kunjungan yang terpenting untuk meyakinkan informasi tentang:

1. Adanya pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI, BTI, Pemuda Rakyat (PR), Gerwani dan simpatisan serta orang biasa yang difitnah (di-PKI-kan). Dan mayatnya dikubur di hutan-hutan serta dibuang ke sungai Bengawan Solo. Angka pasti berapa yang dibantai belum ada, tetapi yang jelas ribuan, seperti Blora saja dinyatakan 6.000 sampai 8.000 orang.

   Sesudah diadakan pengecekan oleh Ibu Sulami cs di beberapa tempat, di hutan jati Ngampel Jurusan Blora – Rembang, hutan jati Cabak Bogarejo jurusan Blora – Cepu dan hutan jati Payaman jurusan Cabak Klepoduwet ke Randublatung, di semua hutan itu terdapat kuburan masal korban keganasan Pemerintahan ORDE BARU (SOEHARTO) 1965/1966.

   Diantara tiga tempat, satu yang dipilih untuk digali, yaitu hutan Payaman, yang disitu terkubur juga Ketua DPRD Blora bersama istri. Hal tersebut di atas berita dari Boyolali dinyatakan 6.000 s/d/ 8.000 orang. Porwodadi belum terhitung yang bisa dipastikan di suatu tempat saja ada kurang lebih 2.000 orang. Sama halnya Solo dan Sukoharjo. Tiap malam ratusan orang antre untuk mati di tempat pinggiran (tepian) sungai Bengawan Solo. Mulai akhir Oktober 1965 hingga tahun 1966.

   Untuk daerah-daerah kecil, nama-nama yang dibunuh telah ada daftarnya, seperti : Magelang, Temanggung, Wonosobo, Sragen dan lainnya. Kota-kota lain sedang dalam pengurusan. Daerah-daerah yang belum dikerjakan masih banyak, di Jawa Tengah, seperti Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Salatiga. Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, daerah Pantura dan masih banyak yang lainnya.

   Daerah Jawa Timur boleh dikata belum dijamah, bahkan masih dalam rencana. Ternyata pekerjaan semacam ini tidak bisa sekali

kunjungan bisa selesai. Kita harus sabar, teliti, pandai, cerdik menggunakan kesempatan, karena penguasa/ sisa Orde Baru akan selalu menghalanginya. Meskipun tujuan kita hanya mencari kebenaran dari informasi.

2. Daerah yang belum di kunjungi akan menunggu giliran. Karena kita sellalu terbentur dana dan tenaga sukarela.

3. Rencana selanjutnya akan menepisi daerah perbatasan Jawa Tengah–Jawa Barat, seperti Banjarnegara dan sekitarnya, sebab menurut informasi, sungai Serayu telah menampung ribuan mayat kawan-kawan. Bersamaan kita akan mengerjakan Jawa Timur yang belum terjangkau.

Khusus untuk luar Jawa akan dibentuk Kelompok Kerja sendiri. Dimulai dari kontak-kontak kerja dengan kawan-kawan yang sedia jadi sukarelawan dan mau kerja keras. Kesemuanya supaya kita bisa di pastikan kebenarannya (pernyataan Sarwo Edy kepada Permadi, SH.)

Kalau kita tidak bisa menuntaskan kasus ini terasa membawa beban mental seumur hidup, beban sejarah perjuangan bangsa di Indonesia, yang akan kita wariskan kepada anak cucu, generasi muda yang akan menjadi pelaku-pelaku perjuangan masa depan yang bebas dari penindasan Kapitalisme/Imperialisme beserta agen-agennya.

4. Rencananya kita akan membentuk Kelompok Kerja sampai ke daerah-daerah. Sedangkan yang menjadi kendala utama adalah DANA. Daerah-daerah yang belum terjangkau, seperti Bali, NTB, NTT, Sumatera dan lain-lainnya, masih kita usahakan bagaimana cara mengatasinya.

Sementara biaya yang kita butuhkan hanya biaya transportasi, sedangkan untuk makan dan tidur selama ini di tanggung teman-teman.

***

I. KELAHIRAN YPKP 65-66

IDE/GAGASAN

Semula ide/gagasan untuk meneliti korban yang khususnya adalah korban pembunuhan pasca G. 30 S.1965/1966, dan tentunya juga tidak lepas terhadap korban-korban penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan harta benda dan lain-lain yang ada hubungannya dengan peristiwa G. 30 S. 1965

Sebagaimana tersebut diatas pada tahun 1994. Ibu Sulami cs telah mempunyai ide/gagasan perlunya dilakukannya penelitian terhadap kuburan-kuburan massal korban teman-teman, bahkan sudah dicoba untuk mengadakan penelitian bersama teman-teman (Sulami cs.) ke beberapa daerah , terutama di daerah Jawa Tengah.

Ibu Sulami Cs mulai meneliti ke daerah-daerah dengan bekal semangat yang keras keberadaan kuburan-kuburan pasca G.30. S 1965 di daerah Jawa Tengah. Adapun yang menderong perlunya dilakukan itu adalah untuk membongkar hal-hal yang masih misteri.

Pada tahun 1965, saudara Iskandar juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Sulami. Menurut saudara Iskandar bahwa pembunuhan di daerah Blora. Jawa Tengah itu cukup banyak dan proses pembunuhannya sangat sadis sekali. Sudara Iskandar sendiri mencoba meneliti di hutan-hutan daerah Blora tersebut dengan pura-pura mencari burung. dengan membawa senapan angin dan ketapel. Adapun yang mendorong Saudara Iskandar untuk melakukan penelitian tersebut dengan pertimbangan:

1. Di Blora. pembunuhan tahun 1965/1966 terjadi dalam jumlah yang cukup besar.
2. Pembunuhan terjadi dengan cara yang ganas/kejam.
3. Banyak anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) menjadi korban pembunuhan massal
4. Iskandar memberikan jaminan bahwa penggalian yang merupakan misi penting itu akan sukses .

Ternyata setelah Saudara Iskandar bertemu dengan Ibu Sulami tidak ada perbedaan tujuannya sama.

PERSIAPAN PENGGALIAN KORBAN PEMBUNUHAN DI BLORA JAWA TENGAH

Persiapan untuk penggalian korban pembunuhan tahun 1965/1966 di blora. Jawa Tengah di lakukan di bulan Juni 1998. Hal itu setelah dilakukan

beberapa pertemuan di rumah kontrakan Ibu Sulami di Jl. Pajajaran No.87 Tangerang.

Ada tawaran dari wartawan dari Australia untuk bekerjasama dalam melaksanakan penggalian setelah kesemuannya sepakat untuk dilaksanakan penggalian kuburan korban pasca G. 30 S 1965 tersebut. maka saudara Iskandar terus pergi ke Blora untuk menemui saudara Sulis perlu koordinasi persiapan pembongkaran sebagai berikut berupa:

1. Menyediakan 1 (satu) orang penunjuk jalan
2. Menyediakan 4 (empat) orang penggali
3. Menyediakan mobil untuk mengangkut
4. Menyediakan hotel untuk penginapan rombongan wartawan dari Australia 2 (dua) wartawan, 2 (dua) kru video, dan 1 (satu) pengantar sekaligus penterjemah.
5. Menyediakan penginapan untuk rombongan Ibu Sulami.
6. Menyediakan sarana yang berhubungan dengan adat kebiasaan: garam dan tanah dari kuburan "Nyai Roro Kidul" Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.

PROSES PELAKSANAANNYA

Tanggal 4 Juli 1998 rombongan wartawan dari Australia datang di Semarang dengan kereta api dari Jakarta.

Di Semarang di Jemput oleh rombongan Ibu Sulami yang terdiri Ibu Sulami, Sulastri, Subarti. Iskandar dan sopir. Mereka datang dari Sragen, dengan mobil sewa (Rp. 150.000 sehari) merek "Kijang". Sulami dan Sulastri adalah mantan anggota Gerwani, Subarti adalah adik kandung Ibu Sulami, sedangkan sopirnya adalah Wiratmo eks tapol Pulau Buru. Selanjutnya ke sepuluh orang bermobil ke Blora lewat Purwodadi.

Sebelum pelaksanaan penggalian pada tanggal 8 Juni 1998 saudara Iskandar diberitahu bahwa misi akan dimulai. Keputusan pertemuannya tanggal 13 Juni 1998 (Sabtu), saudara Iskandar diminta datang kembali ke Blora dengan diberikan uang untuk keperluan perjalanan sebesar Rp. 500.000,-. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 1999, saudara Iskandar menemui pak Sulis. di desa Bangkle.

Pada hari itu juga saudara Iskandar memberi uang Rp. 100.000,- kepada Pak Sulis untuk membeli bensin.

Pada hari keempat saudara Iskandar diajak menemui Pak Tri dari desa Cabak, sebagai saksi hidup yang tahu persis tempat lobang kuburannya. Pak Tri ini dulu pegawai kehutanan. yang pada tahun 1965 dihentikan pemberian gajinya hingga kini.

Oleh Pak Tri, bahwa banyaknya pekuburan yang sudah di acak-acak or-

ang yang hanya mencari barang-barang yang melekat pada mayat mayat korban seperti cincin emas dan lain-lain.

Semula korban pembunuhan di daerah Blora itu dibuang ke sungai Bengawan Solo, namun kemudian mendapat protes dari Pemda Gersik, bahwa para nelayan/pencari ikan di sungai tersebut sangat dirugikan, karena ikan yang mereka tangkap tidak laku, karena ikan yang ditangkapnya makan daging mayat-mayat manusia yang dibuang ke sungai Bengawan Solo. Atas dasar protes tersebut kemudan pembunuhan dilakukan di hutan-hutan dan mayatnya sekaligus dikubur di situ.

KEDATANGAN ROMBONGAN DI BLORA

Sampai di Blora dengn naik mobil "Kijang" sudah sore. Rombongan wartawan menginap sebagai wisatawan di sebuah hotel kecil milik orang Indonesia di daerah Bangkle, Blora. Rombongan Ibu Sulami menginap di rumah kakak lelaki saudara Iskandar.

Malam itu juga oleh Saudara Iskandar berkonsultasi dengan Ibu Sulami, dilakukan kontak dengan penunjuk jalan Pak Sulis dan keempat penggali, dan keempat penggali adalah mantan pegawai jawatan Kehutanan yang di pecat tanpa hak pensiun. Mereka akan membawa cangkul dan arit sebagaimana layaknya petani ladang yang akan menggarap ladang dengan tanaman tumpang sari jagung, kacang, singkong. Pak sulis dan masing-masing penggali dibayar Rp.50.000.-.

Tanggal 5 Juli 1998 pagi sekitar jam 09.00 dengan dua mobil (satu mobil lagi disewa dari Blora) rombongan besar menuju lokasi penggalian di desa Cabak di timur Blora dengan penunjuk jalan SS.

Subarti sebagai anggota rombongan yang paling menguasai adat kebiasaan, menaburkan garam dan tanah kuburan yang sudah dimantra-mantrai Alasan ritual: penggalian tersebut merupakan tindakan menantang rejim yang berkuasa, maka rintangan paranormal yang mungkin menghambat harus dihilangkan, dan jalan ke arah sukses harus diratakan.

Lokasi penggalian berupa semacam jurang kecil, digali dengan cangkul. Tetapi lokasi yang berada diantara dua lereng tanah itu rupanya menyerap rembesan air dari kanan-kiri, sehingga penggalian terganggu oleh luapan air. Belum sampai dasar jurang, penggalian dihentikan. Diputuskan untuk mencari lokasi yang lain. Waktu itu di sekitar jam 10.00

Rombongan besar menuju desa Payaman di jurusan Randublatung. Sampai di tempat, mobil diparkir, lalu rombongan berjalan kaki, naik turun sejauh sekitar 100 meter diantara pepohonan jati yang rindang.

Seperti tadi, penggalian diawali dengan penaburan garam dan tanah kuburan oleh Subarti. Belum lama penggalian dilakukan, datang mandor hutan yang sedang melakukan kontrol hutan. Melihat mobil diparkir, ia mendekat, bertanya kepada sopir yang tetap di mobil, dan dan menemui

rombongan.

Subarti yang menghadapi mandor hutan. Atas pertanyaan mandor hutan tersebut, Subarti mengarang dalih: "Sekarang ini kan bulan *Ruwah*? Saya bermimpi, seorang keluarga saya yang hilang minta dibawa pulang. Dia gambarkan, dia terkubur di sini. Jadi saya bermaksud membawa kerangkanya pulang."

"Seluruh kerangka?" Tanya mandor hutan.

"Yah, tidak usah seluruhnya'" jawab Subarti

Kepada mandor hutan diberikan uang Rp.50.000,- dan penggalian dilanjutkan.

Subarti mengarang untuk mandor hutan, bahwa salah seorang wartawan asing itu adalah calon menantunya, seorang ahli kehutanan juga sedang meneliti kayu-kayuan.

Datang jagawana (penjaga hutan) yang sedang memeriksa hutan. Jagawana diajak bicara oleh mandor hutan menghadiri penggalian sampai selesai, sedang kepadanya diberikan juga uang Rp.50.000,- tetapi jagawana meninggalkan tempat penggalian tersebut sebelum selesai penggalian.

Lokasi penggalian itu panjangnya sekitar 2 meter. Sesudah penggalian sedalam 0.5 meter diketemukan sandal jepit yang sudah rusak. botol kecap, sendok yang sudah patah, ompreng aluminium, pelples aluminum, dan sisa-sisa tikar. Penggalian dilanjutkan, dan diketemukan belahan tulang kepala, tulang rahang, tulang gigi, tulang pipi, tulang lengan bawah, dan tulang punggung. Tidak ditemukan sisa-sisa pakaian dan pelengkapnya. Ini menimbulkan dugaan, bahwa korban pembunuhan sudah tidak berpakaian. Seluruh tulang dikumpulkan, dan dimasukkan dalam dos indomie.

Mandor menyarankan agar penggalian dihentikan. "Akhiri saja. Daripada nanti ketahuan patroli", katanya.

SS menawarskan diri untuk meyelamatkan saja temuan yang sudah diperoleh, dan melanjutkan kembali ke hotel. Waktu itu sudah jam 14.00. Satpam (Satuan Pengamanan) hotel mulai mencurigai. Sebetulnya apa maunya orang-orang itu?" tanyanya.

"Mereka itu ahli kehutanan," jawab rombongan. Rombongan wartawan tetap menginap di hotel, dan rombongan Sulami tetap menginap di rumah kakak lelaki Iskandar. Pagi harinya, tanggal 6 Juli rombongan bermaksud ke hutan lagi, tetapi oleh pemilik hotel diusir dan tak diizinkan lagi menginap. Pemilik hotel pun malah mencurigai.

Kedua rombongan bersepakat bertemu di jembatan Padangan, dekat Cepu. Sebelum menuju jembatan Padangan, rombongan wartawan melakukan pemotretan atas obyek-obyek penting dalam kota, antara lain monumen. Mereka didatangi Kodim (Komando Distrik Militer dan disuruh segera meninggalkan kota.

Iskandar membela para turis dengan menerangkan segi positifnya. Petugas

Kodim membantahnya dengan mengatakan "Nanti mereka menulis macam-macam tentang kota ini".

Kedua rombongan bertemu di jembatan Padangan, dan dari sana mereka menuju ke hutan wisata Padangan untuk melakukan pemotretan dan wawancara, tetapi ternyata disana terlalu banyak orang, hingga keduanya terpaksa dibatalkan dan mereka meninggalkan hutan wisata.

Di daerah Padangan itulah rombongan menemukan rumah pendopo yang belum selesai dibangun. Rumah sampingnya dipakai sebagi warung. Rombongan berhenti untuk makan –makan di warung desa itu, yang menjual pisang goreng, tempe goreng, krupuk, disamping menjual kopi. Iskandar punya gagasan untuk menyewa bagian belakang rumah itu untuk melakukan pemotretan dan wawancara. Pemilik rumah setuju disewa Rp.50.000,- yang ditawarkan. Selanjutnya dilakukan wawancara dan pemotretan, sedangkan wawancara dilakukan langsung dengan Sulami, Subarti dan Sulastri. Usai itu makanan dan minuman dibayar, seluruhnya Rp. 17.000,-

Dengan itu acara penggalian korban pembunuhan tahun 1965/1966 di Blora Jawa Tengah. selesai, selesai pula pembuatan video tentangnya.

Catatan:

1. Menurut Informasi Pak Sulis, jumlah korban pembunuhan tahun 1965/1966 di kabupaten Blora mencapai angka kurang lebih 6.000-8.000 orang. Angka itu diperoleh dari hasil penghitungan jumlah anggota Gerwani (Lembaga Kebudayaan Rakyat), PKI, PR dan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang praktis habis dibunuh.
2. Menurut berbagai sumber dari Blora sendiri pembunuhan tahun 1965/1966 di kabupaten Blora sangat ganas. Contoh:
   a. Darmawan, Ketua PKI Blora, disileti mukanya, dan dengan muka bercucuran darah di pamerkan kepada semua anggota keluarganya, sebelum akhirnya dibunuh.
   b. Supiah, ketua Gerwani Blora dengan sengaja hanya ditembak kakinya lalu dikubur hidup-hidup.
3. Pembunuhan di Blora tidak mengecualikan perempuan.
4. Hanya untuk kelima anggota rombongan Sulami, dan total seluruh oprasi penggalian korban pembunuhan tahun 1965/1966 di Kabupaten blora ini menghabiskan dana Rp. 5.000.000,-.

KEPULANGAN ROMBONGAN KE JAKARTA

Semua berkemas-kemas untuk meninggalkan kota Blora. Bagi Ibu Sulami, Subarti dan Sulastri, karena pertimbangan fisik dan usia, maka mereka di antar Saudara Iskandar hanya sampai terminal Ngawi. Selanjutnya ketiga

ibu-ibu tersebut melanjutkan perjalanannya ke Sragen.

Tanggal 8 Juli 1999 Saudara Iskandar memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Ternyata di bus dia didekati oleh dua orang anggota kodim, yang duduk di belakangnya. Untuk menghindari pertanyaan yang macam-macam saudara iskandar mengambil kesempatan pada saat dua orang anggota Kodim tersebut sedang ketiduran, cepat-cepat saudara Iskandar ke muka mendekati sopir, dan minta dihentikan, ia pun turun kemudian terus naik kendaraan lain, hingga sampai ke rumah.

II. Deklarasi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966

Pembentukan Yayasan

Setelah dilakukan pembongkaran kuburan korban pembunuhan peristiwa G. 30 S di hutan wilayah kabupaten Blora pada tanggal 6 Juli sampai dengan 8 Juli 1999 (di desa Cabak), maka selanjutnya Ibu Sulami menghubungi Saudara Pramudiya Ananta Toer untuk melaporkan hasil pembongkaran kuburan di hutan desa Cabak, Blora Jawa Tengah.

Pada saat Pramudya ke luar negeri, kaset video pembongkaran kuburan korban pasca G.30S 1965 dibawa, dan berhasil diputar di beberapa Perguruan Tinggi, dan kemudian diputar juga di Eropa. Hasilnya positif, banyak LSM-LSM yang memberikan respon terhadap usaha teman-teman perlunya ditindak lanjuti.

Kemudian beberapa orang telah dihubungi untuk menindal lanjuti peristiwa pembongkaran kuburan di daerah Blora tersebut di atas. Ibu Sulami, Pramudya Ananta Toer. Hasan Raid, Kusalah Subagyo Toer, V.Sumin Martono, dr. Ribka Tjiptaning, Suharno dan beberapa teman yang lain seperti Iskandar, Fauzia dan lain-lain mengadakan pertemuan di Hidup Baru, di Hotel Cipta, Jakarta, sepakat untuk dibentuk Yayasan.

Pertama ada usul dibentuk sebuah yayasan yang bernama LKKP 1965/1966 saat pertemuan di rumah kontrakan Ibu Sulami di Jl. Pajajaran No. 87, Tangerang. Kemudian atas persetujuan teman-teman nama tersebut tidak cocok, untuk gantinya dibentuk sebuah yayasan yang bernama YPKP 1965/1966 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966). Dan akhirnya nama YPKP 1965/1966 disepakati bersama. Kemudian tinggal pembentukan logonya.

Adapun mengenai LOGO, karena tugas YPKP 1965/1966 adalah yang utama mencari/meneliti korban pasca G 30S. 1965, maka telah disetujui bersama bahwa logonya tersebut terlukis dua orang lelaki dan perempuan sedang membongkar kuburan massal.

Pada tanggal 7 April 1999 YPKP 1965/1966 pada tanggal 15 April 1999 YPKP 1965/1966 dideklarasikan di YLBHI Jakarta dengan Badan Pendiri Yayasan sebagai berikut:

1. Bp. Hasan Raid
2. Bp. Pramudya Ananta Toer
3. Ibu Sulami
4. Bp. Kusalah Subagyo Toer
5. Ibu Veronica Sumini Martono
6. Ny.dr. Ribka Tjiptaning
7. Bp. Suharno

Sedangkan yang bertindak sebagai pengurus, susunannya sebagai berikut:

Penaschat I	: Bp. Pramudya Ananta Toer
II	: Bp. Hasan Raid
Ketua Umum	: Ibu Sulami
Wakil I	: Ny. dr. Ribka Tjiptaning
Wakil Ketua II	: Ibu V Sumini Martono
Sekretaris I	: Bp. Haryo Sungkono
Sekretaris II	: Bp. Winarso
Sekretaris III	: Ibu Sulastri
Bendahara I	: Bp. Suharno
Bendahara II	: Ibu V. Sumini Martono

Hubungan Luar Negeri dan Dalam Negeri	: Kusalah Toer
Wakil Hubungan Luar Negeri dan Dalam Negeri	: Bp. Bejo Untung
Staf Sekretaris I	: Ibu Sri Muhajati
Staf Sekretaris II	: Mbak Yuni
Perwakilan Negeri Belanda	: Ibu Ratih
Bagian Humas	: Bp. Iskandar
Pembantu Umum	: Sdr. Yoyok

Tangerang, 28 Agusius 1999

UNTUK MENDAPATKAN DANA

Sementara untuk biaya rutin dicarikan sumbangan di lingkungan teman-teman sendiri. Pada bulan Mei 1999, YPKP 1965/1966 membuat surat edaran yang tertanggal 10 Mei 1999. untuk minta sumbangan kepada para pemerhati terhadap YPKP 1965/1966. Surat beserta daftar para penyumbang terlampir.

SIARAN PERS

YPKP 1965/1966 telah membuat siaran pers yang isinya adalah tentang perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Jendral SOEHARTO atas Presiden SOEKARNO, yang pada tahun 1965 di dahului dengan apa yang dinamakan

"Gerakan 30 September", disusul dengan pembantaian massal.

Jumlah korban pembantaian rakyat yang tak bersenjata. tak berdaya, Soeharto dengan aparat militer dan agen-agennya. Jumlah korban menurut ensiklopedi "Britannica" (1991) antara 800.000 dan 1.000.000 orang. Dan menurut Ratna Sari Dewi dalam wawancara dengan Televisi BBC (1 Juli 1992) 2.000.000 orang, sedangkan menurut Sarwo Edie kepada bambang Permadi, SH. 3.000.000 orang

Pembantaian yang dilakukan di masa damai dalam sejarah dunia itu dianggap benar oleh rejim SOEHARTO (ORDE BARU), padahal jelas-jelas bertentangan dengan isi dan makna Pancasila yang selalu di bangga-banggakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bertentangan dengan Hak-hak Azasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mana pemerintah Indonesia ikut menandatanganinya, sehingga pembantaian itu sangat bertentangan dengan azas hukum dan rasa keadilan yang berlaku baik di Indonesia maupun di dunia Internasional dan juga bertentangan dengan ajaran agama manapun mengenai perlakuan terhadap sesama manusia.

Prakter-praktek ini harus dihentikan, kalau tidak rakyat Indonesia yang sudah dirusak oleh Orde baru akan semakin rusak, sehingga tak seorang pemimpin pun akan sanggup memperbaikinya dan cita-cita masyarakat adil dan makmur hanya akan tinggal lamunan belaka. Untuk itu kita harus bertolak dari kasus yang pertama yang itu meneliti dan mengungkapkan data pembunuhan tahun 1965/1966 seakurat mungkin, sehingga angka-angka tersebut di atas tak kan lagi menjadi angka kira-kira, dan praktek pembunuhan dan perlakuan brutal tersebut di atas tidak lagi menjadi dongeng. Dengan angka-angka dan pengungkapan praktek- itu kita tunjukkan bahwa perbuatan di masa lalu itu bukan hanya tidak benar dan tidak syah, melainkan sangat keliru dan salah untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan ini Jendral Besar SOEHARTO sebagai pelaksana utama pembunuhan dan perlakuan yang salah dan keliru itu harus dimintai pertanggung jawaban.

Dalam hal ini sejak tahun 1994 Ibu Sulami dengan kawan-kawan (Ibu Sulastri, Ibu Subarti dan Saudara Fajar) sudah pernah melakukan penelitian di daerah Blora. Magelang, Boyolali, Purwodadi, Purwokerto. Salatiga, Semarang, Cilacap (Wangon), Kendal (plantungan), Klaten, Sidoarjo, Solo, Sragen, Sukoharjo, Temanggung (Parakan), Wonosobo, dan Yogyakarta secara diam-diam.

Untuk bisa melaksanakan pekerjaan ini secara nasional, maka tanggal 7 April 1999 telah mendirikan YPKP 1965/1966 (Indonesian Institute for Study of 1965/1966 Massacre) dikuatkan dengan Akte notaris no. 1-7 April 199 dan ditanda tangani oleh Notaris Ny. Anny Wahjudi, SH. (bisa lihat pada Akte Notaris di lampiran)

Lebih konkritnya lagi YPKP 1965/1966 mengajak saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam tugas mulia ini dengan cara memberikan sumbangan

dana dan lain-lainnya. Untuk jelasnya bisa lihat pada lampiran.

Demikian inti siaran Pers tertanggal 15 April 1999 yang ditanda tangani Ibu Sulami selaku Ketua YPKP 1965/1966.

III. LAPORAN KEPADA KOMNAS HAM

Masalah pembunuhan massal tahun 1965/1966

Perebutan kekuasaan yang dilakukan Soeharto atas nama Presiden Soekarno pada tahun 1965 di dahului dengan apa yang dinamakan "Gerakan 30 September" disusul dengan pembantaian brutal besar-besaran atas golongan kiri di Indonesia. Pembantaian atas rakyat yang tak bersenjata, tak berdaya dan tak berdosa itu dilakukan di masa damai oleh Soeharto dengan aparat militer dan antek-anteknya. Jumlah korban menurut ensiklopedi "Britanica" (1991) antara 80.000 dan 1.000.000 orang, menurut Ratna Sari Dewi dalam wawancara dengan televisi BBC (1 Juli 1992) 2.000.000 orang, sedang menurut Jendral Sarwo Edhie kepada bambang Permadi. SH. 3.000.000 orang.

Tiga puluh tahun lamanya kekejaman di masa damai yang tiada tara dalam sejarah dunia itu dianggap benar dan sah oleh rejim Orde Baru, padahal tindakan itu jelas bertentangan dengan isi dan makna Pancasila yang selalu di banggakan sebagai ideologi bangsa Indonesia; bertentangan dengan Deklarasi Hak-hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diantaranya ditanda tangani Pemerintah Indonesia bertentangan juga dengan ajaran agama maupun mengenai perlakuan yang patut terhadap sesama manusia.

Kekejaman itu ternyata menjadi pereseden buruk bagi praktik-praktik perlakuan Orde baru terhadap rakyat Indonesia. Kasus –kasus lain yang sifatnya mengorbankan rakyat dan sebaliknya membenarkan tindakan kejam penguasa besar yang pertama tadi. Dengan mudahnya ORDE BARU mengkorup, menggusur, menangkap, menculik, menyiksa, memperkosa dan membunuh demi yang namanya : Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Pancasila dan UUD 1945 kehilangan makna yang semestinya, berubah menjadi pentungan kayu yang tiap kali memakan korban sia-sia, sampai sekarang!!

Praktik ini harus dihentikan, sebab kalau tidak, tata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia yang sudah rusak oleh ORDE BARU ini akan semakin bejat. Rekayasa dan kekerasan kini menjadi satu-satunya acuan dalam menyelesaikan persoalan. Kalau praktik ini diteruskan, akhirnya tak seorang pemimpin pun akan sanggup mendanai ketiga tata tersebut, hingga negara kesatuan akan pecah , dan cita-cita masyarakat adil dan makmur hanya akan tinggal lamunan.

Perlu kami sampaikan kepada Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM), bahwa pada tanggal 7 April 1999 di Jakarta telah terbentuk Yayasan penelitian Korban pembunuhan 1965/1966 (Indonesian Institute for the Study of 1965/1966 Massacare) yang hari ini kami wakili. Yayasan ini dikuatkan dengan akte notaris No.17 April 1999 dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Nanny Wahyudi, SH. dan didirikan oleh :

1. Bp. Pramoedya Ananta Toer;
2. Bp. Hasan Raid;
3. Bp. Kusalah Subagyo Tur;
4. Ibu Sulami;
5. Ibu Sumini Martono;
6. Ibu dr. Ribka Tjiptaning; dan
7. Bp. Suharno.

Yayasan ini bermaksud meneliti dan mengungkapkan kasus pembunuhan tahun 1965/1966 sebagai kasus hukum, untuk menemukan data-data akurat mungkin, hingga angka-angkayang tersebut di atas takkan lagi hanya menjadi dongeng. Dengan pengungkapan angka-angka dan praktik tersebut, kita tunjukkan bahwa perbuatan di masa lalu itu bukan hanya tidak benar dan tidak sah, melainkan lebih-lebih keliru untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan ini Jendral Besar SOEHARTO sebagai pelaksana utama pembunuhan dan perlakuan salah itu harus dimintai pertanggung-jawabannya.

Dengan ini kami minta dengan sangat, agar Komnas HAM dapat

1. *MENDUKUNG KEGIATAN YAYASAN KAMI*
2. *MEMBENTUK DIVISI KHUSUS YANG BERTUGAS MENELITI JUGA KASUS PEMBUNUHAN TAHUN 1965/1966, SEBAGAIMANA KOMNAS HAM MENELITI KASUS-KASUS PEMBUNUHAN YANG LAIN SEPERTI KASUS TANJUNG PRIOK, KASUS LAMPUNG, KASUS DOM DI ACEH DAN KASUS TIMOR-TIMUR.*
3. *MEMBERIKAN PENGERTIAN KEPADA MASYARAKAT INDONESIA BAHWA KASUS PEMBUNUHAN 1965/1966 MERUPAKAN PERISTIWA YANG MEMBENCANAKAN BANGSA INDONESIA, HINGGA APABILA TIDAK SISELESAIKAN SECARA ADIL AKAN BERAKIBAT TERJERUSMUSNYA RAKYAT INDONESIA KE* JURANG KENISTAAN.

IV. SALAM HANGAT DARI LONDON

TAPOL The Indonesia Human Right Campaign 13 June 1999

Dear Sulami

Saya baru menonton film yang dibuat orang Australia bernama "INDONESIA'S KILLING FIELDS". Saya sungguh kagum dengan keberanian SULAMI untuk memunculkan dirinya dalam pekerjaan yang mulia ini. Salam hangat dari saya untukmu.

Bagaimana kelanjutan pekerjaan Yayasan? Apakah penelitian masih diteruskan dan diam tempat-tempatnya?

Saya juga ingin tahu tentang publikasi buku memorimu. Seingat saya, saya pernah mengusulkan agar bagian tertentu diperdalam isinya., terutama bab yang mengenai pengadilan. Bagaimana pendapatmu? Sebaiknya dijelaskan mengenai bagaimana tuduhan-tuduhan dan apakah ada saksi yang dihadirkan, juga siapa yang menjadi adanya usaha-usaha yang begitu brutal untuk meyakinkan orang bahwa Gerwani adalah suatu organisasi yang amoral.

Kami di sini sangat sibuk mengikuti perkembangan-perkembangan di Timor-Timur dalam menghadapi jajak pendapat PBB. Saya khawatir bahwa usaha TNI akan membuat peristiwa itu sebagai suatu yang memukul hak-hak Rakyat Timor-Timur yang begitu lama menderita di bawah kekuasaan Indonesia. Keadaan di Aceh juga sangat memilukan bukan?

Ya, militer sudah tidak bisa merubah kebiasaan mereka untuk membunuh dan melakukan represi terhadap orang-orang yang melawan.

Sulami, saya mengharap sekali kabar darimu mengenai keadaan kehidupanmu dan teman-teman lain karena rindu saya terhadap kalian. Bagaimana hubungan lewat *email?* Baik sekali kalau bisa diteruskan.

Sewaktu Pramudya berada di Washington, saya sempat bertemu, karena kebetulan saya berada di situ untuk menghadiri konfrensi mengenai Aceh.

Sekian saja kabar dari saya untukmu
Salam dari London
Carmel

V. KEGIATAN YPKP 65/66

1. Mengadakan pertemuan pertama (workshop) di Wisma Kompas di Cipanas. Jakarta pada tanggal 21-23 Juli 1999 yang dihadiri perwakilan-perwakilan se-Jawa dan Bali (luar Jawa belum terbentuk)
2. Workshop kedua (II) di Semarang tanggal 11 s/d 12 Desember 1999. Kesimpulan dalam Workshop ke II di Semarang tersebut adalah sebagai berikut:

I. DARI KOMISI UMUM

1. Perlu adanya penyebaran Anggaran Dasar mengenai :
   a. Stempel
   b. Organisasi – Pusat – Daerah Tk I – Cabang (Tk II)
   c. Kerjasama dengan luar.
2. Membuat petunjuk kerja (JUKLAK)
3. Setiap langkah jangan melampaui Akte dan AD/ART

Cara kerja yang dihadapi adalah :

- Ekstern
- Keluarga
- Diri sendiri

Untuk itu perlu diperhatikan cara kerja dengan menggunakan legalitas yang ada dengan kesepakatan yang tinggi.

- Semua problematik yang tidak dapat diproses lewat formulir bisa disajikan lewat bentuk cerita:
  a. korban perkosaan
  b. dilecehkan
- Munculnya usul-usul tentang masalah keputusan Menteri. UU atau TAP MPRS XXV/1966. YPKP Pusat melalui Bapak Hasan Raid dalam dengar pendapat dengan DPR Komisi II telah mengusulkan tentang pencabutan Peraturan/UU produk ORDE BARU yang menekan ex-tapol beserta keluarganya, ialah Peraturan Mendagri No. 32/1981 dan TAP MPRS NO. XXV/ 1966

II. DARI KOMISI HUBUNGAN LUAR

Yang di Ketua-i : Bp. Kusalah Subagyo Toer
Sekreteris : Bp. Bejo Untung dan Agus

KESIMPULAN KOMISI

1. YPKP adalah sebuah Yayasan yang kegiatannya berdasarkan Akte Notaris, sebagai Yayasan yang kegiatannya dirumuskan

dan di atur oleh pasal-pasal Akte Notaris.

2. YPKP tidak memiliki anggota, yang ada adalah perwakilan di daerah-daerah dan dibentuk oleh sukarelawan-sukarelawan. Sukarelawan tidak mendapat ikatan apapun, karena itu tidak terhalang untuk memasuki badan-badan lain.
3. Komisi hubungan luar setuju bila hubungan diluaskan dengan kader-kader lain yang hampir senada kegiatannya dengan YPKP. baik di tingkat nasional ataupun internasional.
4. YPKPtidak terjun dalam bidang politik, walaupun yang diteliti adalah produk politik dan secara umum tidak lepas dari masalah politik.

III. DARI KOMISI ORGANISASI

Di ketuai : Bp. Puji Rahardjo
Sekretaris : Sdr. Sigit

Kesimpulan Komisi

Orgarisasi : 1. Jaringan Organisasi
2. Mekanisme kerja : a. Profesional
b. Penguasaan materi

Jaringan Kerja YPKP : Organisasi Sukarelawan
Landasan : Akte Notaris.

1). Setelah dibentuk pengurus TK I perlu dibentuk jaringan-jaringan:

- Bagian orgarisasi
- Bagian publikasi
- Kontak dengan daerah lain
- Bagian pembantu umum/administrasi
- Bagian penasihat
- Bagian Humas

2). Untuk TK II sama dengan TK I dan bertanggung jawab kepada TK I.

Diusulkan : Perlu JUKLAK pelaksanaan kerja lapangan yang seragam dan tehnis kerja di lapangan sebagai PEDOMAN KERJA sampai pada TK II dan Kecamatan

MEKANISME KERJA:

1. Profesionalisme (cara kerja)
   a. menguasai materi
   b. menguasai situasi dan kondisi (sikon)

2. Penguasaan Materi

Yang dimaskud penguasaan matreri adalah hal-hal yang menyangkut advokasi (langkah hukum). dan penelitian kejadian (tempat kejadian peristiwa dan selanjutnya)

UNTUK YPKP PUSAT

(1). Perlu membuat Petunjuk Pelaksanaan Kerja di lapangan, pada umumnya wilayah.

(2). Untuk daerah kecamatan-desa, diserahkan sesuai dengan kondisi setempat.

Buku Panduan harus memuat:

- Latar belakang YPKP
- Hasil kerja YPKP (yang telah terselesaikan)
- Petunjuk kerja di lapangan (JUKLAK)

IV. DARI KOMISI DANA

Kesimpulan: Bentuk pengkajian Dana Nasional/ Daerah bisa didapat dari :

1. Donatur tetap/tidak tetap
2. Mendirikan badan Usaha
3. Membuat Kalender. Dagang, Usaha garmen
4. Kerjasama dengan pengusaha. misalnya: Catering, meng-sub pekerjaan-pekerjaan pengusaha dan lain-lain.
5. Dengan modal patungan kerja. pada anggota yang mampu.

V. KEBUTUHAN YPKP MELIPUTI

1. Sekretariat
2. Tim Peneliti
3. Transportasi
4. Akomodasi
5. Biaya Administrasi
6. Seminar 2 kali/tahun
7. Perlengkapan riset

3. PERTEMUAN DI GUNUNG SALAK TANGGAL 30-31 JANUARI 2000

Beberapa pertemuan penting pertemuan Gunung Salak : 30-31 Januari 2000

Sebagaimana telah diketahui bahwa YPKP 65/66 Pusat telah menyelenggarakan pertemuan di Gunung Salak yang dihadiri perwakilan di berbagai daerah yang berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 31 Januari 2000.

Adapun maksud pertemuan yang tampaknya dipersiapkan mendadak

ini adalah untuk menyikapi situasi politik dan pemerintahan dewasa ini dalam hubungannya dengan kegiatan YPKP 65/66.

Walaupun hasil-hasil pertemuan ini sudah disampaikan ke perwakilan daerah ada baiknya kami laporkan beberapa hal penting untuk diketahui oleh para relawan YPKP dimana berada.

1. Keberadaan YPKP telah diketahui oleh semua jaringan pemerintah, maka itu YPKP 65/66 harus bekerja lebih giat dan terarah agar maksud dan tujuan YPKP dapat dicapai dengan baik.
2. Hasil-hasil workshop Semarang dapat sambutan baik dari sahabat-sahabat di luar negeri. terbukti dengan telex yang dikirim dari negeri Belanda dan termasuk Menteri Ham RI bapak Muhtar Hasballah.
3. Pertemuan menyambut positif laporan Ketua YPKP dari luar negeri antara lain:
   a. Peserta Simposium bersedia kerja sama dengan YPKP.
   b. Perlu ada Perwakilan spesial Indonesia di dalam organisasi Amnesti Internasional.
      Komnas Ham Indonesia tidak bisa diterima menjadi anggotanya karena dibentuk oleh pemerintah.
   c. Perjalanan Ketua YPKP ke Perancis mendapat sambutan hangat, diantaranya dari Organisasi Masyarakat Eropa, Parlemen Eropa, yayasan Sosial Ham yang dipimpin oleh janda presiden Prancis Ny. Mitterand dan lain-lain. Umumnya mereka bersedia kerja sama dan saling bantu dan akan mengkampanyekan YPKP ke seluruh dunia.
4. Penjelasan Bapak Hasan Raid tentang kedatangan tamu intel Komdak di kantor YPKP 65/66 serta tentang rekonsiliasi nasional.
5. Setuju diadakannya pelatihan dan Pendidikan Penelitian dan di harapkan/diharuskan masing-masing daerah mengirimkan calon petugas. Pelatihan akan dilaksanakan pada bulan April 2000.
6. Merencanakan akan menghadap Presiden Gus Dur, dan mengikutsertakan wakil-wakil daerah.
7. Waspada terhadap oknum-oknum di daerah yang ingin menyalah-gunakan keberadaan YPKP.

Demikian beberapa hal penting yang dihasilkan di Gunung Salak.

(S.K. No, 5 Tahun I Maret 2000)

VI. TAMU KITA

(2 JAM BERBINCANG-BINCANG DENGAN TUAN "MURAI YOSHINORA")

Hari itu Rabu tanggal 23 Februari 2000, tiba-tiba Hand Phone Bu Sulami berdering dan kala itu terlihat jam di dinding menunjuk angka 10.00 pagi. Dari jauh lamat-lamat terdengar Bu Sulami berbincang. "Ya, benar, saya sendiri. Baik, terima kasih. Anda keluar terminal saja, di depan ada angkot T. 14. Anda naik saja dan bilang ke Pajajaran 87. Perum III, saya tunggu"

Dari dalam Bu Sulami datang memberitahu kalau sebentar lagi akan ada tamu dari Jepang. Benar, tak lama kemudian terlihat seorang mendekati pintu pagar. Sambil menjemput ke depan pintu, dalam hati berkata "Oh, ini to tamunya", seorang tengah baya dan ciri khas seorang reporter: sebuah fulpen tergantung di lehernya dan ransel kumal yang penuh dengan segala keperluan tugasnya.

"MURAI", katanya, sambil mengangguk hormat khas ala Jepang. Entah telinga saya yang sudah mulai kurang pendengarannya, kontan saya jawab saja, "Betul ini rumah SULAMI".

Pintu saya buka dan tamu saya persilakan masuk. Entah, mana yang lebih dulu menjulurkan tangan dia atau saya. Yang jelas, kami berjabat tangan dan sekali lagi terdengar di telinga saya "MULAI". Saya Jawab dengan khas Jawa yang bertemu orang baru, senyum ramah sambil tangan kananku menyilahkan tamu itu masuk ke rumah lebih dulu.

Di dalam rumah Bu LAMI siap menyambut sang tamu. Dan lagi-lagi dia bilang "MULAI". Setelah berjabat tangan dengan Bu LAMI DAN Bu MINI dia membagi-bagikan kartu nama L.S.M dan satusnya lagi atas nama Yayasan sebuah Universitas di Jepang. Begitu saya baca nama kartu nama tadi, *astagfirullah*, alangkah malu saya. "Mulai" yang berkali-kali dia ucapkan adalah nama panggilannya, sebagai yang tertulis di kartu nama adalah "Murai".

Tuan Murai ini LSM NINJA. Seram memang namanya. Tapi itu singkatan dari NETWORK FOR INDONESIAN DEMOCRACY JAPAN. Dan satu lagi Atas nama Yayasan INSTITUTE OF ASIAN CULTURE SOPHIA UNIVERSITY TOKYO JAPAN. Organisasi ini baru dua tahun berdiri, namun sangat concern atas peristiwa yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan kemanusiaan dan demokrasi.

MURAI bisa terdampar ke YPKP 65/66 ini awalnya di bulan Desember 1999, dia ke Eropa. Di sana dia berjumpa dengan teman-teman Indonesia di Belanda dan Perancis, memang kerja kawan-kawan diluar negeri benar-benar bukan omong kosong saja. Mereka berkampanye buat YPKP. Setiap berjumpa dengan LSM dari mancanegara tak lupa menyebut nama YPKP 65/66, suatu institusi satu-satunya di Indonesia yang sangat concern terhadap korban 1965/

1966 tanpa pamrih.

Tak lupa kepada Murai juga diterangkan tentang keberadaan YPKP 1965/1966 di Indonesia. Rupanya ia sangat tertarik akan kegiatan YPKP. Hal ini saya lihat dari cara dia mendengarkan dengan serius kata demi kata yang diucapkan oleh Ibu Sulami.

Oh, ya. Hampir lupa saya. Di awal pembicaraan, sambil ngobrol dia menyodorkan amplop, katanya cuma sedikit, hanya sebagai tanda simpati kepada YPKP dari Lembaga dimana dia bekerja. Mudah-mudahan bantuan dari sahabat Jepang ini dapat ikut membantu meringankan beban YPKP yang makin hari makin besar. Tidak lupa sambil menerima amplop, Ibu Sulami mengucapkan terima kasih atas kesetiakawanannya ini. Selanjutnya amplop diberikan kepada saya untuk diterima sebagimana mestsinya. Sekali lagi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kawan Murai.

Tidak terasa hari sudah sore, jam menunjukkan pukul 13.15. Karena jadwal dia masih banyak, dan dirasa sudah cukup, maka dia minta pamit, pulang. Kemudian dijemput angkot T.14 kita antar sampai jalan.

Selamat membaca, selamat berjuang, sampai jumpa di pelatihan nanti. Mudah-mudahan kami di Indonesia ini ikut tergugah melihat kesetia kawanan teman dari Jepang tersebut dan tetap bersatu dalam perjuangan menegakkan kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

(Oleh Har-SK No.5 th. I 2000)

Training Center

Mengadakan Training Center di Jakarta (Cipanas) tanggal 5 April 2000. Pidato pembukaanya (Ibu Sulami) adalah sebagai berikut:

TRAINING CENTER YPKP
DI JAKARTA (CIPANAS) 5 APRIL 2000

Sambutan Ibu Sulami

Dengan sangat terpaksa saya tidak dapat meresmikan acara Job Training YPKP ini, karena secara mendadak sekali atas persmintaan Menteri HAM saya harus menghadiri acara yang dibuatnya di Yogyakarta. Mengingat sangat pentingnya acara tersebut dan masih relevan dengan perjuangan YPKP tentang Hak Azasi Manusia serta hubungan baik di masa mendatang, maka permintaan beliau saya turuti walau di lain pihak acara kita yang tidak kalah besar dan penting ini dibuka tanpa kehadiran saya. Untuk perasaan kecewa saudara-saudara ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan selamat datang dan rasa terima kasih yang mendalam atas solidaritas, perhatian dan bantuan dari saudara-saudara kita dari luar maupun dari dalam negeri, yaitu Saudari

Helen Jarvis, Saudara Hebert Feith, Saudara Kresna Zein dari Australia. dan saudara Carmel dari Inggris yang datang terlambat. Bapak Dede Utomo, bapak dr. Handoko, Bapak Munir, SH. Bapak Hendardi, Saudara Paskah Irianto, Saudara Irawan Saptono, Saudara Ibnu Basori, Saudara Stanley, Saudara Eri Sutrisno, saudari Agung Tri dan Saudara Aleks yang telah menyatakan kesediannya untuk mengkoordinir dan menjadi instruktur pada Training Center ini. Mudah-mudahan berkat bantuan beliau-beliau ini YPKP yakin bahwa Training Center ini akan banyak merubah wajahnya menjadi sebuah Yayasan Penelitian yang sangat profesional dan berguna bagi usaha dan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan bagi martabat manusia. Khususnya untuk menjernihkan sejarah bangsa Indonesia.

Demikian pula saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada partner kerja sama kami, SNB (Solidaritas Nusa Bangsa) yang telah bekerja keras tidak kenal lelah dan waktu untuk terselenggaranya training Center ini terutama dalam menanggulangi kesulitan maupun tantangan yang menghadang di depan kita.

Kepada seluruh pimpinan YPKP Pusat beserta teman-teman daerah, serta tenaga-tenaga muda pengikut kursus, calon penerus generasi bangsa semuanya sehari-hari di sini sehat-sehat, hingga dapat menyerap ilmu dengan baik yang akan berguna bagi perjuangan lebih lanjut.

Lupakanlah sejenak problem rumah tangga yang mengganggu, sehingga kita dapat belajar dan bisa menyerap ilmu semaksimal mugkin. Sekali lagi saya minta maaf dan akan bertemu kembali pada tanggal 8 April 2000 yang akan datang.

Selamat Belajar !!!

YPKP PUSAT
Ketua

SULAMI

Kemudian disusul oleh kunjungan Madames Danielle Mitterand (janda Presiden Perancis, Mitterand) dari France Liberte, dari Perancis

Persiapan

Untuk penyambutan tamu YPKP 65/66 dari Perancis, yaitu MME DANIELE MITERRAND (janda Presiden Perancis), maka pada hari Rabu tanggal 23 April 2000 diadakan rapat untuk persiapan penyambutan tamu tersebut sebagai berikut:

Hadir dalam Rapat:

Bp. Hardoyo Bp. Umar Said Bp. Hasan Raid Bp.Simon Tiranda

Bp. Gustav Dupe	Bp. Heru Atmaja	Mis.Nia Sarifudin	Mis. Nunung
Bp. Hernowo	Bp. Suparno	Mrs. Fauziah	Mrs. Santi
Bp. Syamsu	Bp. Suharno	Ibu Sumini	Ny. Ester
Bp. A. Zaini	Bp. Sumadi	Sdr. Budhi	Mis. Ivon

AGENDA RAPAT:

Dalam pertemuan ini khususnya membicarakan 2 (dua) agenda pokok, yaitu

1. Membentuk Steering Comitte kunjungan Madame DANIELE MITERRAND dari FRANCE LIBERTE.
2. Menyikapi Hasil Sidang Tahunan MPR Th. 2000 terutama tentang Amandemen UUD 1945 pasal 28 ayat 1

Rapat dibuka oleh tuan rumah (Suharno) yang secara singkat menjelaskan maksud membentuk Sterring comitte, karena kedatangan tamu MME adalah juga tamu buat semua LSM yang peduli akan perjuangan HAM dan pembangunan Bangsa. Bahwa kedatangan MME bukan hanya untuk YPKP saja, sesuai dengan kegiatan FRANCE LIBERTE yang menangani semua kasus baik itu kasus HAM maupun kasus-kasus lainnya, di mana FRANCE LIBERTE telah mempunyai jaringan yang kuat di seluruh dunia. Oleh karena itu kedatangan beliau supaya dimanfattkan semaksimal mungkin oleh LSM-LSM yang ada di Indonesia.

Adapaun jadwal kunjungan MME dibagi 4 (empat) bagian.

Bagian pertama tanggal 23-25 Agustus 2000 singgah di bali dalam rangka menuju ke DILI. Di BALI akan disambut oleh ibu Sulami, YPKP perwakilan bali dan LSM Bali.

Bagian kedua tanggal 28-31 Agustus 2000

Tanggal 28 Agustus 2000 kedatangan di bandara akan disambut oleh Panitia, jumlah peserta akan ditunjuk oleh tuan rumah, dalam hal ini YPKP.

Tanggal 29 Agustus 2000, jam 10.00-14.00 MME berkunjung ke YPKP Tangerang, khusus bertemu dengan para korban yang sekaligus pengurus YPKP di daerah-daerah.

Jam 16.00-19.00 MME berkunjung ke PRD (Partai Rakyat Demokrasi) di Coffee Flora ex hanggar TNI-AU Jl. Gatot Subroto- Pancoran- Jakarta Selatan.

Tanggal 30 Agustus 2000, jam 10.00-14.00 Audience dengan presiden dan Wakil Presiden. Menurut keterangan Bp. Umar Said yang sudah kontak dengan Sekneg Presiden ada kesediaan menerima tamu, hanya tanggalnya yang belum dikonfirmasi.

Jam 16.00-1900 MME berkunjung ke PRAMUDYA ANANTA TOER.

Tanggal 31 Agustus 2000 jam 10.00-14.00 Roundtabele dengan agamawan sekitar 40 Orang bertempat di "Hilton" tetapi ini belum *fix* benar.

Jam 16.00-19000 berkunjung ke Bp. Ali Sadikin di Jl. Borobudur. Tenggang

jumlah yang akan dikonfirmasi beberapa orang kesediaan tuan rumah menerimanya

Bagian ketiga tanggal 01-02 September 2000

Kunjungan MME ke Yogyakarta, rencana detailnya akan diatur oleh YPKP Yogyakarta dan LSM di Yogyakarta.

Bagian keempat tanggal 03-04 Septmeber 2000

Kunjungan akhir di Indonesia. Acara disepakati dirubah menjadi sebagai berikut:

Tanggal 03 September 2000 kembali dari Yogyakarta. Hari kosong ini akan diisi kemudian.

Tanggal 04 September jam 10.00-13.00 bertemu dengan LSM HAM dan LSM Pembangunan bertempat di Gedung Pola- Jl. Proklamasi.

Jam 13.00-14.00 Konfrensi Pers di Gedung Pola.

Jam 18.30 meninggalkan Jakarta, kembali ke Perancis.

Dari hasil pertemuan ini untuk mengkoordinir pertemuan dengan Agamawan maupun LSM dipercayakan kepada Ester Yusuf. Sebagai pembantunya diserahkan sepenuhnya Ester menunjuknya sendiri. Hadirin sepakat.

Dari Mis Nia Syarifudin ada kesediaan untuk menyumbang menyewa tenda buat tamu tanggal 29 Agustus 2000 serta menyediakan nasi bungkus untuk makan siang di tanggal 4 September 2000.

Tentang pertemuan dengan Agamawan tempat dan lain-lain akan disumbang oleh relasinya Mrs. Ester Yusuf.

Pak Umar Said minta bantuan kepada hadirin untuk menyampaikan undangan kepada tamu-tamu di dalam kunjungan MME di tempat Pak Pramudya. Hadirin bersedia membantunya. Setelah dianggap cukup menelaah agenda pertama. maka seterusnya ke agenda yan kedua yaitu menyikapi hasil Sidang Umum MPR 2000 terutama tentang amandemen UUD 1945 Pasal 28 I pasal I.

Sebagaimana diketahui bahwa diloloskannnya amandemend pasal tersebut. kelak para pegiat HAM akan mendapat batu sandungan dengan berlakunya pasal baru tadi. Karena itu tuan rumah mengajak semua pengunjung yang diwakili LSM HAM untuk bersama-sama mengadakan pernyataan bersama LSM-LSM se Jabotabek telah pula membuat pernyataan pers. Oleh karena itu sangat mendukung kehendak ini. Untuk tidak terlalu banyak membuang waktu redaksionalnya disetujui dikerjakan oleh Ester Yusuf, yang kemudian drafnya akan di chek kembali sebelum dibuat finalnya.

Demikian pertemuan ditutup pada jam 16.54

(Pembuat Notulen – Team YPKP 65/66)

VII. MASALAH DISKRIMINASI

MASALAH DISKRIMINASI YANG PERLU DISAMPAIKAN, PADA PENGUASA YANG MASIH DIBERLAKUKAN TERHADAP WARGA NEGARANYA

Untuk menindak lanjuti hal-hal yang menyangkut perlakuan yang diskriminatif terhadap ex-Tapol/Napol dan keluarganya, maka dirasa perlu YPKP 65/66 memberikan penjelasan kepada Presiden RI selaku kepala pemerintahan, dimana hingga sekarang masih banyak aparat pemerintahan yang masih bertindak seperti aparat ORDE BARU yang memberlakukan warganya berbeda.

Untuk itu pada tanggal 16 Oktober 2000, YPKP 65/66 Pusat melayangkan surat yang ditujukan kepada Kepala Pemerintahan Presiden Republik Indonesia KH. ABDURRACHMAN WAHID yang isinya secara utuh beserta lampirannya kami tulis sebagai berikut :

Surat Tertanggal 16 Oktober 2000 dengan No. Surat 05/ypkp/X/2000
Lampiran 2 (dua) bundel
Perihal laporan tentang YPKP 65/66 dan Kegiatannya.

Isi Surat:

Bersama ini kami melaporkan kepada Bapak mengenai YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan Tahun 1965/1966) beserta kegiatannya.

YPKP didirikan pada tanggal 7 April 1999 terdaftar dengan No. I/1999 di Tangerang di hadapan Notaris NY. NANNY WAHYUDI Sarjana Hukum dan telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Tangerang Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 1999 dengan Nomor Pendaftaran HI.01.04; 209 199 PN TNG. Kemudian juga telah dideklarasikan pada tanggal 15 April 1999 bertempat di gedung YLBHI Jl. Diponegoro Jakarta. Pada Akte notaris terlampir, tertera azas dan tujuan YPKP, bahwa YPKP ingin berperan serta untuk :

a. membantu Pemerintahan Republik Indonesia dalam usaha ikut mencerdaskan bangsa guna mewujudkan masyarakat Pancasila seutuhnya.
b. Berusaha berdasarkan kemapuan yang ada dalam pengamalan Pancasila serta UUD 1945 dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat Pancasila secara murni dan konsekuen.

Demikian selanjutnya YPKP berusaha menghindari dan menjauhkan cara-cara pembodohan terhadap rakyat baik mengenai Hak Asasi manusia, tegakkan keadilan serta pelurusan Sejarah, termasuk khususnya kegiatan penelitian untuk pengungkapan pembunuhan yang merupakan tragedi 65/66 termasuk pelanggaran kemanusaan terhadap para keluarga korban yang

sudah terbunuh, maupun yang sudah dibebaskan kembali, masih sulit untuk mendapatkan hak-haknya sebagi warga negara misalnya. untuk menjadi anggota TNI, pegawai Sipil (P.N.) belajar ke luar negeri termasuk mendapatkan ikatan-ikatan dinas, harus bersih lingkungan dan lain-lainnya, meskipun pemerintah sudah menghapus LITSUS. Sedangkan bagi korban langsung yang telah dibebaskan, masih mendapat perlakuan yang diskriminatif. misalnya; di sana-sini masih mendapat wajib lapor. KTP yang belum bersih sepenuhnya. meskipun tanda ET (Eks Tahanan) sudah tehapus, umur 60 tahun ke atas belum mendapatkan KTP seumur hidup, hanya ada beberapa yang secara kebetulan terjadi. Dengan demikian sangat membatasi ruang gerak mereka sekalipun hanya untuk mencari nafkah.

Bapak Presiden, jika kami mengetengahkan masalah ini, bukan berarti untuk membalas dendam, kecuali keinginan tulus, agar dikemudian hari peristiwa yang sangat menyedihkan ini, yang mengorbankan orang-orang tidak berdosa, hendaknya tidak terulang lagi.

Dengan demikian bangsa ini akan menatap hari depan tanpa beban lagi, karena kebenaran telah ditegakkan untuk kemudian mendukung usaha rekonsiliasi nasional oleh para pihak yang sekarang juga sedang berlangsung.

Seperti yang kami yakini, Bapak Presiden juga mengetahui bahwa perjuangan ini cukup berat. Dimana hingga saat sekarang masih ada elemen-elemen di dalam masyarakat yang belum mau mengerti pada usaha mulia ini. Hingga masih berpendapat bahwa penelitian tersebut (yang masih diprakarsai oleh para korban Peristiwa G30 S 1965) dianggap akan menghidupkan kembali ideologi dan organisasi PKI. Hingga dilakukan manuver-manuver provokatif terhadap YPKP. termasuk mencoba membakar kantor dan mengusir para aktivis YPKP agar meninggalkan tempat.

Pada kesempatan ini kami hanya ingin menegaskan bahwa kegiatan YPKP hanya terpusat pada penelitian serta kegiatan kemanusiaan yang luhur, bukan sekedar menjadikan peristiwa itu hanya sebagai masa lalu saja. Tentang kegiatan YPKP sekarang ini baru pada taraf persiapan penelitian, penandatanganan serta survai lapangan seperti terlampir bersama ini.

Kemudian dengan rasa hormat, dimana kami merasakan bahwa Bapak Presiden akan sangat memperhatikan masalah pengembangan demokrasi di Tanah Air kita ini, kami sebelumnya menyampaikan terima kasih yang tak terhinga.

Pengurus YPKP Pusat

Sulami	Suharno
Ketua	Sekretaris

Lampiran Surat No. 05/YPKP/X/Din/2000

Kegiatan-Kegiatan YPKP

1. Tanggal 15 April 199 dideklarasikan berdirinya YPKP 1965/1966 di depan Pers dalam dan Luar Negeri, mengambil tempat di YLBHI Jl Diponegoro. Jakarta Pusat.
2. Mengadakan Workshop Pertama di Cipanas, tanggal 21-22 Juli 1999 dihadiri oleh Perwakilan YPKP se-Jawa. Bali. Tujuan Workshop untuk menyusun program kerja penelitian jangka panjang dan jangka pendek. Dana didapat dari sumbangan rekan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan Yayasan Sosial Pengembangan dan Sosial (YSIP)
3. Membentuk jaringan penelitian kehormatan di propinsi-propinsi yang belum dibentuk perwakilan dan cabang-cabang pada setiap kabupaten di Seluruh Indonesia. Waktu Juli sampai dengan Desember 1999.
4. Ketua YPKP mendapatkan kehormatan mandapat undangan dari Komite Internasional Melawan Kekerasan Negara terhadap warga negara untuk hadir pada seminar sehari di Amsterdam, belanda, pada tanggal 10 Desembr 1999. Hadir dari Indonesia antara lain Menteri Negara HAM, Bapak Hasballah M. YLBHI. Utusan dari Aceh dan Dosen dari ITB.
5. Selama di Negeri Belanda, mendapat undangan dari Masyarakat Indonesia di Belanda dan Masyarakat Indonesia di Paris. Mereka menyambut gembira atas berdirinya Yayasan ini dan menggantungkan harapan semoga perjuangan kemanusian YPKP dapat terwujud. Di Paris mendapat undangan dari Madame Danielle Mitterand, baik sebagai mantan isteri Presiden maupun sebagai ketua France Liberte. Beliau sangat memahami betapa menderita rakyat Indonesia di bawah Rejim ORDE BARU, karena itu secar moral sangat mendukung usaha-usaha yang dilakukan YPKP dalam ikut mengisi kemerdekaan dan demokrasi bersama pemerintahan GUS DUR yang demokratis dan menjunjung tinggi-tinggi supremasi hukum.
6. Workshop kedua di Semarang tanggal 11-12 Desember 1999. Diikuti oleh perwakilan cabang-cabang yang telah dibentuk. Biaya didapat dari sumbangan sukarela siapa saja yang menaruh perhatian dari kegiatan kemanusiaan ini. Dalam. Dalam Workshop ke-II ini diadakan evaluasi kerja dan rencana penelitian dari bulan Juli s/d Desember 1999.
7. Pertemuan di Gunung Salak, Sukaburni tanggal 28 Februari 2001. Pertemuam ini terbatas Perwakilan-Perwakilan untuk membicarakan situasi saat itu dan apa yang terjadi di lapangan terhadap para relawan YPKP di daerah-daerah.
8. Tanggal 5 sampai 15 April 2000 bertempat di Cianjur, diselenggarakan latihan kerja Penelitian yang meliputi pekerjaan Dokumentasi. Tehnik

Wawancara. Tehnik Pengambilan Gambar, Saksi-saksi dan lain sebagainya. Dimana pembimbingnya terdiri dari tenaga-tenaga ahli pada bidangnya dari perguruan tinggi dan Institusi penelitian. Pengikut pelatihan ini adalah perwakilan-perwakilan dari Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra dan Tenaga-tenaga muda lulusan perguruan tinggi yang lulus dari seleksi penerimaan.

9. Mengikuti Seminar-seminar tentang rencana RUU Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi Nasonal yang diselenggarakan oleh Elsam. Menteri Negara HAM secara berturut-turut yang diadakan di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Jakarta.
10. Pada tanggal 20 Juli 2000 di Hotel "CEMPAKA", Jakarta diselenggarakan Seminar Sehari bersama Solidaritas Nusa Bangsa, ISAI, ISIS PAKORBA, Hidup Baru. Komite pembebasan Tapol/Napol dan beberapa Tokoh pelaku Peristiwa 1965 yang kemudian juga dijebloskan ke dalam penjara oleh penguasa ORDE BARU. Tema seminar ini adalah "MENCARI KEBENARAN DAN PELURUSAN SEJARAH"
11. Pada tanggal 28 Agustus 2002 sampai dengan 4 September 2000 mendapat kunjungan MADAME DANIELLE MITTERAND isteri mantan Presiden Perancis. sebagai kunjungan balasan ketika Ibu Sulami berkunjung ke Paris. Dalam kesempatan kunjungan yang sangat singkat ini Madame Danielle Mitterand berkesempatan bertemu langsung dengan para korban pelanggaran HAM tahun 1965/1966 yang masih hidup dan ahli warisnya. serta meninjau sebagian tempat-tempat penguburan massal di tahun 1965/1966. Antara lain di LUWENG-Wonosari D.I.Y. Juga berkesempatan untuk bertemu denga GUS DUR.
12. Saat sekarang ini sedang dilakukan Persiapan Penelitian. Pendataan. Orientasi Lapangan untuk seluruh wilayah yang sudah terbentuk Perwakilan-Perwakilan YPKP. Ini semua dalam rangka melaksanakan program kerja jangka penclek yang akan ditutup pada akhir tahun 2000. Hasil-hasil kerja selama 2 tahun ini sebagai landasan untuk melaksanakan program untuk jangka panjang, yaitu menuntut Keadilan bagi pelaku pekanggaran HAM berat mantan Presiden SOEHARTO.

——000———

YPKP 65/66-S.N.B. datangi Komnas HAM pada hari Kamis tanggal 20 April 2000

Pada hari Kamis 20 April 2000, YPKP Pusat dan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) mendatangi Komnas HAM. Ini adalah kedatangan YPKP dan SNB ketiga kalinya. Butir-butir agenda yang dibicarakan ialah mengenai kejelasan posisi Komnas HAM dengan Peristiwa Pembantaian massal 65/66. Juga

tentang dukungan Komnas HAM terhadap agenda-agenda kemanusiaan di Indonesia. Dalam hal ini, pembentukan KPP HAM 65/66 sangat diharapkan YPKP.

BN MARBUN dengan di dampingi STAFF, dari Komnas HAM, dan IRMA, staf ahli Komnas HAM di bidang Hukum, untuk ketiga kalinya menerima sumbang pikiran atau pengaduan yang hampir sama dari YPKP. Walaupun Komnas HAM sudah dapat membaca apa yang akan diajukan oleh YPKP dan SNB, BN MARBUN terlebih dahulu ingin mendengarkan maksud kedatangan YPKP dan SNB agar dapat memberi tanggapan yang lebih komprehensif dan juga menanggapi dengan proporsional.

Tidak jauh berbeda dengan kunjungan kedua YPKP dan SNB, dalam diskusi yang dilangsungkan selama hampir 1 (satu) jam itu, SULAMI masih mengharapkan dukungan Komnas HAM untuk membentuk KPP HAM korban 65/66. "Peristiwanya sudah berlalu satu tahun dan keadaan berubah-ubah begitu cepat, terutama pada waktu ini pemerintahan Gus DUR telah memberikan wawasan dan usulnya kepada MPR. Kami mau mengingatkan, saat kami menghadap komnas HAM yang kedua kalinya, Pak MARBUN mengatakan bahwa Komans HAM belum bisa berbuat apa-apa jika masih ada peraturan yang mengikatnya, yaitu TAP MPRS No.XXV/1966. Jadi perjuangan kita, diharapkan oleh pak MARBUN untuk membebaskan, atau mencabut TAP MPRS itu, dan kebetulan sekali bahwa bapak Presiden juga mengatakan demikian. Jadi kami sangat mendukung politik yang diutarakan oleh Presiden selaku penuntun kami dalam melanjutkan perjuangan ini", ujar SULAMI.

Dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara urusan HAM, SULAMI sebagai wakil YPKP diminta masukan-masukannya berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kurun waktu 32 tahun, terutama soal peristiwa 65/66, dan juga berharap Komnas HAM merealisasikan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKR)

ARNOLD PURBA

DalamProses transisi demokrasi yang sedang dihadapi Indonesia, kebijakan pemerintah untuk mencoba melakukan rekonsiliasi merupakan sebuah stage atau tahap awal menuju penyelesaian konflik-konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Tidak akan mungkin terjadi rekonsiliasi sejati di dalam negeri ini, apabila tidak merambah pada persoalan 65/66, karena dalam peristiwa tersebut REJIM ORDE BARU berdiri di atas jutaan rakyat yang dibantai.

Hal tersebut ditekankan ARNOLD PURBA, direktur Organisasi SNB. "Kenapa kami menuntut KPP HAM dibentuk, karena kita pikir inilah langkah awal untuk investigasi. Kalau seandainya pemerintah atau Komnas HAM

tidak melakukan ini, ya jangan salahkan masyarakat untuk membent penelitian korban 65/66 seperti yang dibikin oleh YPKP 65/66", tegas Ar

Masalah Kemanusiaan, Bukan Politik

Ester Indahyani Jusuf SH., ketua dewan pekerja SNB, mengharapk adi perubahan sikap dari Komnas HAM mengenai pembantaian Kemanusia 65/66 yang belum selesai sampai sekarang.

Ester menggaris bawahi keinginan YPKP dan SNE akan adanya K HAM 65/66 adalah dalam rangka rekonsiliasi nasional untuk menyelesaik semua luka-luka yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah kasa 65/66 yang merupakan awal lahirnya pemerintahan Orde Baru.

Baik SNB maupun YPKP tidak membicarakan TAP MPRS No.XX 1966, tetapi perlunya satu investigasi, satu pengungkapan fakta menger kasus pembunuhan 65/66 yang kemudian menjadi dasar bagi rekonsili nasional. Juga SNB dan YPKP tolak berbicara masalah yang hanya kul kulit saja, seprti status ET dalam KTP melainkan pembantaian terhad manusia.

"Pada pembicaan yang lalu kami sangat menyesal, seolah-olah keti berbicara mengenai masalah kemanusiaan, berarti menjadi masalah polit Yang kami inginkan, Komnas HAM juga terlihat masalah pembantaian dal sudut kemanusiaan, karena pada saat ini kami ingin mendapat penegas dari Komnas HAM mengenai sikap terhadap pembantaian kemanusiaan tahun-tahun itu." Kata Ester.

Hal senada juga diungkapkan Suharno, dari YPKP bahwa hendakn sikap Komnas HAM menyoal kemanusiaanya. Menurut Suharno, YPKP ma asalnya, tetapi cara-cara dari penangkapan sampai pada penahanan d pembunuhan yang tidak manusiawi.

65/66 : Masalah Prakarsa

Menanggapi uraian YPKP dan SNB, BN Marbun menjelaskan, Komr HAM pernah berjanji untuk berjuang dan untuk membawakan persoalan pada rapat pleno, dengan catatan bahwa Komnas HAM dari awal tidak pern mengatakan ini gampang dalam arti akan ditangani Komnas HA secepatnya.

BN Marbun menambahkan peristiwa 65/66 adalah persoalan be mengingat TAP MPRS yang masih terus diperdebatkan pencabutannya d sikap sebagian masyarakat yang saling berbenturan untuk masalah ini, raj pleno belum berani mengambil keputusan. Komnas HAM akan berkonsulta dengan pihak-pihak yang barangkali dapat membantu.

Bagi Komnas HAM, peristiwa 65/66 adalah masalah raksasa, kare

menyangkut jutaan orang. Menyinggung masalah TAP MPRS XXV/1966 BN MARBUN menilai adanya pergeseran pemikiran atau kecenderungan bahwa Gus DUR melemparkan bola dengan mengusulkan pencabutan TAP tersebut. Secara Hukum, Gus DUR tidak boleh mencabut TAP itu sendiri. Juga, secara tata negara Gus DUR juga tidak boleh mencabutnya karena tidak berhak.

"Tapi untuk melemparkan masalahnya atau untuk menggulingkan bolanya. betul. Dalam wawancara saya dengan *Interview*, saya mengatakan bagaimana beratnya masalah ini dan suatu ketika harus diselesaikan, tetapi seperti pernah kami katakan, mari kita berjuang bersama," kata BN MARBUN.

MPR-lah yang harus memutuskan mengenai dicabut atau tidaknya TAP MPR tersebut. Tapi masyarakat juga harus mendorong dan memberi sumbangan pikiran secara positif. Dengan demikian akan terjadi pergeseran pemikiran ke arah yang positif.

Menurut BN MARBUN, sudah satu tahun ini, Komnas HAM memonitor bagaimana Afrika Selatan menyelesaikan masalah rasial. Jika harus di hukum semuanya. Maka ditempuh suatu kebijaksanaandan kebijakan yang lebih mengarah pada kebijakan (wisdom). bukan kebijakan (policy).

"Dicari jalan yang paling mungkin dan juga practicable. bisa-bisa dilaksanakan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKR). Dalam komisi kebenaran ini yang salah disalahkan dan diadili. Tapi agar tidak membuka luka baru lagi, mereka diampuni. Itulah hak. sesuai dengan konstitusi mereka, dan jika diterapkan di Indonesia, hal itu mungkin saja", jelas BN MARBUN yang juga menyatakan bahwa masalah AFSEL tidak jauh berbeda dengan masalah 65/66.

"Jadi", lanjut MARBUN, "mengenai pembentukan KPP HAM 65/66. kami dari Komnas HAM yang ada dalam ruangan ini tidak berwenang untuk memutuskan atau menerima, mengatakan ya atau tidak, tapi kami sudah mencoba lampirkan dulu dalam sidang pleno yang lalu"

BN MARBUN menyatakan tidak akan berhenti memperjuangkan pembentukan KPP HAM 65/66. Komnas HAM selalu memaparkan bahwa persoalan ini adalah persoalan nasional. Mengenai TAP MPRS No.XXV/ 1966 Komnas HAM akan mengkaji lagi dengan catatan harus diputuskan oleh bukan oleh BN MARBUN, SUGIRI maupun IRMA.

Memang tidak mudah untuk mengenal betul-betul jati diri Gus DUR, baik pada masa-masa yang lalu, maupun di masa depan. Paling-paling yang bisa kita terka adalah pola berpikirnya yang tercermin dalam tindakan - tindakan, kebijakan atau pernyataan beliau, baik sebagai pemimpin umat Islam maupun sekarang ini, sebagai kepala Negara. Begitu jugalah, barangkali yang dikatakan banyak orang, bahwa ucapan beliau, kadang-kadang membingungkan dan bahwa sejumlah manuver-manuver yang dilakukannya tidak dimengerti bahkan juga oleh pendukung-pendukungnya sendiri.

Dari apa yang saya lihat sendiri dan saya dengar di ruangan Hotel Inter

Continental Paris itu saya mempunyai kesan bahwa Gus Dur, mengaj kita semuanya untuk merajut masa depan rakyat, bangsa dan negara ki Yaitu ajakan kepada kita semua untuk mengkoreksi semua kesalaha kesalahan di masa silam, demi memungkinkan rekonsiliasi di masa depa Untuk itu, kita semua perlu membuang jauh-jauh cara berpikir yang sud dikerangkeng begitu lama oleh Orde Baru, untuk memupuk toleransi an manusia dari bermacam-macam kebangsaan, agama, dan aliran politik (dal kaitan ini patut lah dicatat, bahwa Gus Dur juga telah bertemu muka deng Pierre Mauroy, pimpinan Gerakan Sosialis Perancis dan mantan Perda menteri Perancis. Temu muka ini diatur dalam acara berikutnya, sesud acara dengan kami yang berlangsung selama sekitar 20 menit itu selesa pen).

"Gus Dur tidak bisa melihat, tetapi mempunyai pandangan jauh let luas", ujar Sergio Regazzoni, Direktur Centre Lebret, seorang Italia ya sejak mudanya sudah mencurahkan sebagian terbesar hidupnya unt memupuk persahabatan dan kerja sama antara berbagai bangsa dan raky melalui kegiatan dan macam-macam bentuk dan cara. Ia mempuny hubungan yang luas dengan berbagai tokoh masyarakat dan mengenai bany LSM di berbagai negeri terutama di kawasan ASIA. Umpamanya di Kor Utara, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Filipina, Indocina, Thailand, Ind Pakistan, Malaysia, Srilangka dan juga Indonesia. Gus Dur sud mengenalnya sejak lama.

"Kami pernah punya ide membuat *round table*, dengan harapan bah dalam *round table* itu nanti terkuak apa persoalannya, benang kusutnya cc diluruskan. Dengan kita bersama-sama mengetahui kesalahan kita. Buk menuduh tetapi mencoba mengakui dosa", papar Arnold.

Meminta penegasan lebih lanjut, Ester mengajukan tiga hal. "Pertan kedatangan YPKP dan SNB bukan dalam rangka membicarakan Tap MP No. XXV/1966, tetapi tentang pembantaian yang terjadi. Kedua, BN Marb sempat menjelaskan ada kemenduaan sikap dalam Komnas HAM. Saya ing jelaskan, apakah ini kemenduaan dalam sikap pencabutan Tap MPRS at setuju atau tidak setujunya dibukanya pembantaian kemanusiaan karena d hal yang berbeda. Atau bahkan kemenduaan sikap menolak pencabutan T MPRS dan menolak pembukaan pembantaian sama sekali. Ketiga, mengei bahwa ini adalah proyek yang sangat besar, kami setuju dan mungkin mema penyelesaiannya tidak dalam waktu yang demikian singkat, satu dua bul Tapi kami ingin mendapat kejelasan juga, kira-kira kapan tepatnya kita b mulai melangkah maju. Ya, supaya ada kejelasan saja bukannya har menunggu-nunggu saja."

Menjawab pernyataan dan pertanyaan tersebut, BN. Marbun menyatak Sidang MPR kan sudah dekat, 1 atau 2 Agustus yang akan datang, ja kondisinya harus dipanasi terlebih dulu. Tolong diingatkan atau diberik

surat yang terperinci dan sederhana kepada MPR tadi, ulangi lagi tidak tidak apa-apa, DPR khusus komisi I toling catat itu, Fraksi PKB kalau bisa disebutkan bahwa ini usul Komnas HAM dan Fraksi PDI-P Juga. Tetapi barangkali Fraksi Golkar agak segan.

Menanggapi masalah kemenduaan sikap Komnas HAM, maksud BN MARIAN yang lebih tepat adalah adanya suara bulat dan ada pendekatan. (SK th.II Juli 2000 No 07)

VIII. PENGGALIAN KUBURAN MASAL DI HUTAN NDAMPES, DESA SITUKUP, KALIWORO, WONOSOBO, JAWA TENGAH

Pada saat pembongkaran mayat di hutan Ndampes-Situkup, Wonosobo, karena saat itu kendalanya sangat berat (wakil Bupati memberikan reaksi) dari pemerintah setempat yang sengaja hendak menggagalkan, namun berkat kegigihan IBU SULAMI bersama teman-teman, yang akhirnya pembongkaran mayat bisa dilaksanakan. Kemudian dengan tidak disangka, Ibu Sulami mendadak sakit. Selanjutnya pekerjaan diambil alih oleh Bapak Hasan Raid selaku PJS (Pejabat Sementara). Adapun proses pembongkarannya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 16 – 18 November 2000. YPKP telah mengadakan pembongkaran kuburan massal korban G30S yang berlokasi di hutan Ndampes, Desa Situkup, Kaliworo, Wonosobo, Jawa Tengah.

Pembongkaran bermula dari adanya permintaan keluarga yang mengetahui bahwa anggota keluarganya di "makamkan" di lokasi hutan Ndampes. Setelah adanya permintaan tersebut, maka kami mulai melakukan investigasi lebih lanjut untuk menyelidiki kebenaran dari informasi yang diberikan oleh pihak keluarga. Hasil investigasi mengarah adanya 21 korban yang dibunuh, dilakukan dan dikuburkan secara masal di lokasi hutan NDampes. Ke-21 orang tersebut diperkirakan berasal dari penjara Yogyakarta, dan dieksekusi pada tanggal 3 Maret 1966. Investigasi tersebut berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi mata yang saat ini sudah meninggal.

Setelah melakukan investigasi, kami mulai mengurus perijinan yang diperlukan; ijin kepada Bupati Wonosobo, DPRD, Kodim, Kapolres, Camat Kaliworo dan Perum Perhutani BKBH Ngadisono, Kedu Selatan. Selain perijinan di daerah, kami juga mengajukan ijin ke Komnas HAM. Seluruh Perijinan kami dapatkan pada tanggal 7 November 2000.

Pada hari Kamis tanggal 15 November 2000 pukul 18.00 WIB, kami mengadakan selamatan di Kaliworo yang dihadiri oleh pihak keluarga, tim

penggali dan masyarakat di sekitar lokasi selamatan. KASOSPOL Wonosobo datang ke lokasi penginapan sekitar pukul 19.00 WIB. Beliau datang dengan membawa surat dari Wakil Bupati Wonosobo yang berisi perintah untuk menunda penggalian sampai waktu yang tidak ditentukan. Acara penggalian yang sedianya akan dilakukan tanggal 16 November 2000 pukul 07.00 WIB hingga 16.00 tersebut, kami mendatangi dengan rencana. Pukul 07.00 hingga 16.00 tersebut, kami mendatangi kantor wakil Bupati untuk menyampaikan surat keberatan YPKP terhadap perintah pengunduran acara. Wakil Bupati yang didampingi KASOSPOL mengatakan bahwa penundaan dihasilkan dari rapat MUSPIDA dengan pertimbangan bahwa acara ini belum tersosialisasi di masyarakat, dan ditakutkan akan muncul reaksi-reaksi yang negatif, selain itu juga MUSPIDA menganggap belum ada cukup bukti. Kami menolak penundaan tersebut karena baru disampaikan satu hari menjelang hari H dan alasan-alasannya juga tidak kuat. Wakil bupati Menyatakan bahwa pada pagi itu juga yaitu pukul 09.00 akan diadakan rapat kembali rapat MUSPIDA untuk mempertimbangkan YPKP. Hasil rapat Muspida menyatakan bahwa MUSPIDA tidak dapat mengambil keputusan, kelanjutannya adalah acara tergantung dari rekomendasi Komnas HAM yang akan diberikan pada Pukul 11.00 WIB. Sampai Pukul 11.15 kabar dari Komnas HAM belum juga diterima, padahal di lokasi penggalian panitia dan masyarakat sudah ramai berkumpul sejak pukul 07.00 pagi. Sementara itu di tempat lokasi aparat dari KODIM sudah mulai mengusir massa dan panitia, mereka mengatakan bahwa panitia, yaitu YPKP, yang sebenarnya sedang negosiasi, sudah membatalkan acara. Untunglah panitia di lokasi tidak terprovokasi dan tetap sabar menunggu. Karena khabar dari Komanas HAM belum juga datang, akhirnya panitia ambil inisiatif dengan langsung menghubungi sekjen Komnas HAM sebenarnya sudah diberikan pada pukul 09.30 pagi. Hal ini jelas bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh Bupati yang diwakili oleh KASOSPOL. Setelah dikonfrontir keterangan tersebut pada KASOSPOL, akhirnya wakil Bupati memeriksa ijin.

Setelah proses perijinan selesai, barulah penggalian dapat dilaksanakan. Setelah mengidentifikasi lokasi, penggalian dilakukan dengan di dahului pembacaan doa oleh tokoh NU setempat. Proses penggalian agak terganggu karena banyaknya massa dan kurangnya pengalaman. Pihak Kepolisian tidak mau memberikan pengamanan, karena tidak diperintah secara tertulis, pihak banser yang hadirpun tidak mau memberikan pengamanan di sekitar penggalian, karena ada pihak yang wanti-wanti mereka agar hanya memberikan pengamanan bila sudah diterima surat persetujuan tertulis dari wakil Bupati Wonosobo. Walaupun prosesnya agak tersendat, tetapi penggalian cukup berhasil dan diakhiri pada sekitar pukul 5 sore. Pada malam hari itu, lokasi dijaga oleh panitia dan pihak Polres yang telah mendapatkan ijinnya. Penggalian yang dilakukan selama tiga hari mendapatkan hasil di luar dugaan.

Dugaan semula jumlah yang berada di lokasi tersebut adalah 21 orang, tetapi ketika kerangka yang ke-21 berhasil ditemukan, tim dokter forensik yang dipimpin oleh HANDOKO, masih menemukan 3 (tiga) kerangka lagi dan diperkirakan jumlah tersebut masih bertambah karena lubang belum kesemuanya tergali. Seharusnya seluruh kerangka yang berada di lubang tersebut harus dikeluarkan semua, tetapi hal ini tidak kami lakukan, karena panitia sudah kehabisan tenaga dan dana. Akhirnya sekarang lokasi penggalian tersebut dipagari dan dikunci. Kunci kami serahkan ke PEMDA setempat, dan pengamanannya diserahkan kepada mereka.

Ke-24 kerangka yang berhasil ditemukan tersebut sekarang berada di RSUP Sardjito Yogyakarta untuk diidentifikasi.

KONFRENSI PERS

Sehubungan dengan temuan kerangka-kerangka tersebut, kami adakan pertemuan di KOMNAS HAM pada Senin tanggal 20 November 2000. Kami minta agar KOMNAS HAM membentuk KPP HAM untuk menyelidiki peristiwa 1965/1966. Permintaan tersebut cukup beralasan, karena bukti pelanggaran HAM yang kami dapatkan cukup kuat, pada sebagian besar kerangka-kerangka yang kami temukan tersebut ada lubang bekas peluru yang diperkirakan berasal dari tembakan jenis senjata otomat dan laras panjang.

Kami tidak setuju dengan pendapat KOMNAS HAM yang menyatakan bahwa KOMNAS tidak ingin lagi membentuk KPP HAM sebelum ada rekomendasi dari DPR. Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) RUU Pengadilan HAM mengatakan bahwa wewenang untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran berat hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM dengan membentuk KPP HAM. Pada dasarnya penyelidikan berbeda dengan pengadilan. Pada tingkat penyelidikan pada tujuan utamanya ialah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana, agar selanjutnya dapat dilakukan apabila hasil penyelidikan menunjukan adanya temuan-temuan yang diduga diakibatkan pelanggaran HAM. Mengenai kekhawatiran KOMNAS apabila nanti berhasil penyelidikan diadakan tersebut tidak ditindak lanjuti melalui peradilan, bukanlah merupakan alasan yang kuat, untuk tidak melakukan penyelidikan. Apabila hasil penyelidikan memang menunjukkan adanya pelanggaran HAM berat, maka konsekwensinya akan ada banyak pihak yang mendesak DPR untuk membentuk pengadilan HAM. Hasil penyelidikan KPP HAM tersebut juga bisa dipergunakan untuk proses Pengadilan Internasional, apabila memang nantinya mekanisme hukum di Indonesia tidak dapat menyelesaikan kasus kejahatan kemanusiaan pada tahun 1965/1966.

Diajukan dalam Seminar Setengah Hari "Mengungkap Tragedi Kemanusiaan 1965/1966"
Jakarta, 12 Desember 2000

LAPORAN HASIL PENELITIAN:

1. PENGGALIAN PADA HARI I TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

Penggalian dilakukan sedalam 0,5 – 1,5 meter, dalam dataran area itu miring (agak curam). Pada kedalaman sekitar satu meter mulai ditemukan potongan tulang tengkorak yang berukuran sekitar 5x6x0,5 Cm dengan konsistensi rapi.

Penggalian diteruskan dengan mencoba mengidentifikasi posisi jenazah. Setelah dicoba mengikuti alur posisi jenazah maka kami dapati posisi korban saling tumpang tindih. Selama penggalian hari pertama ini didapati sekitar 8 posisi korban yang tidak beraturan, bertumpang tindih secara tidak teratur. Setiap tulang yang ditemukan adalah tulang yang rapuh. Penggalian diteruskan dengan amat hati-hati dan peralahan-lahan.

KERANGKA yang didapat adalah:

a. 4 tulang kepala, 2 diantaranya ada luka tembak. Pada posisi satu ditemukan sebuah sisir berwarna merah dan gigi geligi bagian depan yang telah dipangur dengan amat rapi.
b. Rahang atas dan bawah ditemukan dengan gigi geligi yang tidak utuh.
c. Tulang-tulang yang bertumpang tindih tidak beraturan, yaitu tulang lengan atas, tulang radialis, tulang tungkai atas dan tulang-tulang iga. Semua tulang diatas tidak dalam keadaan utuh dan sebagian ditumbuhi akar pohon.

2. PENGGALIAN PADA HARI KE-II (TANGGAL 17 NOVEMBER 2000.

Jumlah korban yang ditemukan adalah 9 jenazah. Dengan perincian sebagai berikut:

a. Posisi 9.
b. Posisi 10; Ditemukan cincin emas dengan tulisan nama Sudjijem 26-06 1965. Di sekitarnya terdapat selongsong peluru dan sebuah anak peluru serta sisir plasitik berwarna biru muda. Usia korban diperkirakan berusia 24 tahun.
c. Posisi 11; Diantara tulang-tulang terdapat sebuah kancing baju berwarna abu-abu dengan diameter 1 cm, satu selongsong besar dan lima selongsong kecil.
d. Posisi 12; Pada potongan tulang kepala diperkirakan pada bagian pelipis terdapat tulang bekas tembakan dan di dekatnya terdapat proyektil dua buah.
e. Posisi 13; terdapat bekas patah tulang yang telah sembuh (menyambung kembali) pada tulang kering kanan bagian bawah.

f. Posisi 14; belum ditemukan keistimewaanya.
g. Posisi 15; Terdapat potongan baju kaos berlubang-lubang warna putih. Ada potongan gigi palsu seri 1 atas.
h. Posisi 16; Di dekatnya terdapat kemasan pasta gigi Dental.
i. Posisi 17; Belum ditemukan keistimewaanya

3. PENGGALIAN PADA HARI KE-III (TANGGAL 18 NOVEMBER 2000)

Penggalian pada hari ketiga ditemukan 7 posisi baru, sehingga total posisi korban dari penggalian hari pertama sampai hari ketiga ada 24 posisi.

a. Posisi 18; Ditemukan sandal jepit (alas) yang bercorak warna-warni terbuat dari karet , diduga merk Swallow. Ditemukan juga sebuah sisir berwarna kuning dan dilokasi yang tidak berjauhan ditemukan sandal bandol (alas karet) lengkap sepasang.
b. Posisi 19; Ditemukan pada rahang atas gigi palsu Platina di bagian depan (dua buah) dan bagian geraham belakang kanan yang kedua (satu buah)
c. Posisi 20; Ditemukan antara tulang belulang di tanah terdapat anak peluru
d. Posisi 21; Belum ditemukan keistimewaan.
e. Posisi 22; Belum ditemukan keistimewaan.
f. Posisi 23; Diantara tulang belulang ditemukan kancing putih berdiameter kurang 1 cm.
g. Posisi 24; Belum ditemukan keistimewaan.

IX. SULAMI MENDAPAT AWARD

(SULAMI MENDAPAT AWARD DARI KOMISI HAM ASIA)

Tanggal 20 Desember 2000 telah berlangsung di Seul. Ibu Kota Korea Selatan: upacara pemberian penghargaan Komisi Hak Asasi Manusia Asia (Asian Human Right Commission) kepada SULAMI.

Seperti sudah disiarkan sebelumnya, tanda penghargaan yang bernama "THE 4TH TJI HAK-SOON JUSTICE AND PEACE AWARD" (Penghargaan untuk Keadilan dan Perdamaian Tji Hak Soon ke-4) ini telah diputuskan oleh komisi bersangkutan sebagai pengakuan atas berbagai kegiatan SULAMI selama ini, terutama berkaitan dengan masalah penelitian korban pembunuhan massal 1965/1966.

Karena SULAMI sedang menderita sakit, maka penerimaan penghargaan

diwakili oleh Hasan Raid anggota Pengurus Pusat dan pendiri YPKP. Berikut terjemahan sambutan Sulami atas pemberian penghargaan tersebut:

SAMBUTAN SULAMI

Saudara ketua dan sahabat-sahabat tercinta.

Saya terpaksa minta maaf bahwa karena sakit, saya tidak dapat bersama-sama Saudara-saudara sekalian menghadiri pertemuan yang menggembirakan ini. Adalah suatu kehormatan yang besar bagi saya untuk menerima "Penghargaan Tji Hak-Soon untuk Keadilan dan Perdamaian" yang ke-empat.

Saya jatuh sakit karena mengikuti penggalian penting sebuah kuburan yang mengundang sia-sia pembunuhan massal yang dilakukan oleh militer Indonesia dalam tahun 1965/1966 di Jawa Tengah. Namun ketika berbaring di tempat tidur di Jakarta, pikiran saya tertuju kepada Saudara-saudara di sini yang hadir dalam pertemuan yang mulia ini.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Komisi Hak Asasi Manusia Asia yang telah memberi kehormatan kepada saya dengan tanda penghargaan ini. Perkenankanlah saya untuk menegaskan bahwa tanda penghargaan ini tidak hanya penting bagi saya pribadi, melainkan juga bagi semua anggota aktif YPKP dan sejumlah besar relawan dan simpatisan YPKP di seluruh Indonesia.

Pemberian tanda penghargaan ini, merupakan pengakuan dari Saudara-saudara sekalian terhadap pentingnya pekerjaan YPKP. Ini merupakan dorongan semangat yang besar bagi kita semua untuk meneruskan perjuangan kita yang berjangka panjang, sulit tetapi penting dalam menegakkan kebenaran tentang pembunuhan massal tahun 1965/1966. Menegakkan kebenaran tentang pembunuhan massal itu adalah syarat untuk menunjukkan jati diri yang sebenarnya rezim militer SOEHARTO.

Pembongkaran sifat-sifat Orde baru diktatur militer SUHARTO sangat penting. Dan ini hanyalah bisa terlaksana kalau reformasi yang sungguh-sungguh dan tuntas terhadap sisa-sisa rezim yang lama bisa dijalankan. Hanya dengan terus menerus menolak sistem politik lama berjuang terhadap sisa-sisanya, reformasi dalam kehidupan bangsa akan mendapatkan suksesnya.

Kalau kita menengok kembali praktikdan politik rezim militer, dapatlah dikatakan bahwa pembunuhan masal 1965 merupakan dasar bangunan (fondasi) rezim yang bersarah ini. Diktatur yang amat kuat itu pada hakikatnya didasarkan atas darah, tulang dan air mata orang-rang tidak bersalah dan jumlahnya tidak terbialang lagi, yang yang pada permulaan dibunuh dalam massacre 1965/1966 dan kemudian juga di Timor-timur, Aceh, Irian Jaya dan tempat-tempat lainnya.

Adalah tidak sulit untuk memahami bahwa suatu rezim yang telah

membunuh jutaan warga negaranya dengan darah dingin dan tanpa segan-segan, kemudian juga bisa melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yang serius. Demikian jugalah halnya dengan rezim militer SUHARTO. Sesudah pembunuhan massal, maka ratusan ribu orang tidak bersalah telah dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Puluhan ribu diantara mereka telah ditahan selama 5, 10 bahkan 15 tahun. Kasus penahanan sewenang-wenang terhadap sekitar 10 000 tapol di Pulau Buru adalah sangat terkenal burknya. Diantara mereka yang ditahan selama lebih 10 tahun di kamp konsentrasi di Pulau Buru itu terdapat pengarang ternama, Pramudya Ananta toer, yang juga seorang diantara pendiri YPKP kita.

Sesudah para Tapol ini dibebaskan dari penahanan yang bertahun-tahun di sekitar tahun 1979, mereka itu bahkan sampai sekarang masih terus diperlakukan secara tidak berprikemanusiaan. Mereka itu masih dianggap sebagai penyakit lepra atau kaum paria dalam masyarakat, dan selalu menjadi sasaran teror mental dan persekusi politik. Mereka itu bisa dibebaskan hanyalah berkat desakan-desakan internasional pada waktu itu, dan karena adanya kenyataan bahwa mereka tidak bisa diajukan ke depan pengadilan berhubung tidak adanya bukti-bukti secara hukum. Tanpa adanya kutukan dan protes opini internasional, pastilah rezim militer tidak bisa dipaksa untuk membebaskan para tapol yang tidak bersalah itu.

Jutaan orang keluarga para korban pembunuhan massal 1965/1966 telah mengalami penderitaan yang berat, karena hilangnya orang-orang yang mereka cintai. Ditambah lagi, jutaan keluarga ex-tapol juga mengalami berbagai ragam teror negara atau intimidasi yang dilakukan secara intensif selama lebih dari 30 tahun. Bahkan para e-x tapol ini tidak menerima kompensasi dari penahanan yang ilegal dan berkepanjangan ini. Mereka juga tidak diberi hak untuk bekerja secara intensif selama lebih dari 30 tahun. Bahkan para ex-tapol ini tidak menerima kompensasi dari penahanan yang ilegal dan berkepanjangan ini. Mereka juga tidak diberi hak untuk bekerja secara normal sebagai warga negara yang biasa. Selama puluhan tahun mereka harus menggunakan kartu identitas spesial yang menandakan bahwa mereka adalah ex-tapol (terkenal dengan nama kartu ET). Ini bisa diibaratkan bahwa para ex-tapol itu dibebaskan dari penjara yang kecil hanya untuk masih memasuki penjara yang lebih besar lagi yaitu, masyarakat itu sendiri.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim militer amatlah besar dan tidak bisa dilupakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, YPKP telah mengambil inisiatif dan menjadikan misinya untuk memperjuangkan di kembalikannya hak-hak sipil bagi jutaan manusia, untuk merehabilitasi kehormatan keluarga para korban pembunuhan massal dan para ex-tapol. Di samping itu, YPKP juga ingin menegskan kembali kebenaran tentang peristiwa-peristiwa dalam 1965/1966. Dengan membongkar kebenaran-kebenaran itu, yang selama lebih dari 30 tahun telah didistorsi

atau dipalsu secara menyolok (kasar) oleh propaganda rezim militer, generasi muda akan melihat kekejaman-kekejaman yang tidak berprikemanusiaan terhadap sejumlah besar orang-orang, tidak bersalah dan dalam jangka yang lama.

Melalui kegiatannya YPKP berharap akan dapat mendorong semua keluarga (sanak saudara) para korban pembunuhan massal dan para ex-tapol untuk menuliskan kesaksian mereka dan meyarakan kepedihan hati mereka. Sampai sekarang hal semacam ini belum terjadi, berhubungan dengan iklim intimidasi dan persekasi yang telah dipelihara secara Sistematis oleh rezim militer. Kalau banyak orang berpartisipasi dalam perdebatan terbuka dan diskusi-diskusi tentang berbagai aspek aksi-aksi penindasan militer, maka masyarakat akan bisa secara lebih baik menemukan kebenaran tidak hanya penting untuk mendorong semagat orang-orang untuk mencari keadilan, melainkan juga untuk menyoroti para pelaku utama kejahatan-kejahatan dan pemerkosaan hak asasi manusia yang terus terjadi di Indonesia.

Dengan semagat yang demikian itulah saya memandang mengapa pemberian tanda penghargaan sekarang ini mempunyai arti yang penting. Kehadirran saudara-saudara merupakan simbol persetujuan dan partisipasi saudara-saudara dalam tujuan-tujuan YPKP, dan lewat YPKP juga tujuan rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan perdamaian, perikemanusiaan dan persaudaraan. Ini merupakan simbol yang mencanangkan bahwa setiap kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana pun dilakukan, adalah keprihatinan kita semua juga. Sebagai bagian dari umat manusia yang mendiami planet kita bersama. Dengan alasan-alasan itulah saya menerima dengan rasa terima kasih yang besar "Tanda Penghargaan Tji Hak-Soon untuk Keadilan dan Perdamaian" yang ke-empat, atas nama begitu banyak orang di Indonesia yang sedang berjuang untuk keadilan dan hak asasi manusia.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia bukanlah masalah pembunuhan massal 1965/1966 saja. Kasus-kasus seperti Timor-Timur, Papua Barat, Aceh, Priok, Lampung, penculikan-penculikan dan lain-lain juga perlu dibongkar. Solusi satu-satunya untuk menegakkan kebenaran lewat Pengadilan HAM yang baru, yang bisa menjadi penghalang terlaksanakannya kebenaran itu. Kita membutuhkan bantuan yang lebih banyak dari masyarakat Internasional.

Jakarta, 20 Desember 2000

X. PERTEMUAN DI SUKABUMI JAWA BARAT

(PERTEMUAN YPKP 1965/1966 DI SUKABUMI JAWA BARAT (TANGGAL 25 – 27 MEI 20001)

KESIMPULAN PERTEMUAN TANGGAL 25 – 27 MEI 20001

Seluruh peserta setuju bahwa dalam melakukan penelitian YPKP harus kembali pada ketentuan dasar yang tercantum pada Akte Pendirian YPKP, sebagaimana Laporan Umum Pjs. Ketua YPKP.

1. *Azaz YPKP* dan implementasinya YPKP berazaskan Pancasila menurut arti serta makna yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan penjelasannya, artinya YPKP pun hanya sebuah yayasan tidaklah berarti iadapat menghindar atau melepaskan diri dari kelangsungan hidup YPKP sendiri. Sebagai yayasan penelitian yang diutamakan ialah melakukan penelitian, bukan persoalan politik Politik YPKP adalah Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu YPKP sangat mendukung gagasan GUS DUR untuk mencabut TAP MPRS No.XXV/1966 (lihat pasal 27 dan 28 UUD 1945)
2. *Maksud dan tujuan YPKP dan implementasinya (taktis)*
   - Membantu Pemerintah RI dalam usaha ikut mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan masyarakat Pancasila seutuhnya.
   - Berusaha berdasarkan kemampuan yang ada dalam pengamalan Pancasila serta UUD 1945 dalam kehidupan bernegara berbangsa dan bermasyarakat Pancasila serta murni dan konsekuen.

   Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti melawan terhadap pembohongan bangsa yang dilakukan ORDE BARU selama 32 tahun melalui deideologisasi dan depolitisasi. Persoalan bangkit atau tidaknya komunisme atau PKI, bukanlah persoalan YPKP. YPKP tidak mempertanyakan pendirian atau sikap politik seseorang yang ingin menjadi relawan YPKP YPKP tidak memperkenalkan relawannya untuk menggunakan YPKP sebagai alat untuk kepentingan suatu partai politik apapun juga. Sesuai dengan azas Pancasila dan UUD 1945 yang dianutnya diharapkan semua relawannya menjadi Pancasilais yang sejati menjadi pem UUD 1945 yang tangguh.
3. *Usaha penelitian YPKP dan penterapannya (strategi).*
   Mengandalkan penelitian terhadap korban pembunuhan tahun 1965/1966 dengan segala implikasinya.
   Penelitian Meliputi: Penelitian Dasar, Penelitian Kasus, dan Penelitian Forensik.
   - PENELITIAN DASAR bermaksud untuk menemukan angka yang dapat

dipercaya mengenai jumlah korban pembunuhan dan kekerasan yang terjadi pada tahun 1965/1966. Mengungkapkan bentuk-bentuk pembunuhan, penyiksaan atau tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap orang-orang atau simpatisan PKI. mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan. penganiayaan dan tindakan kekerasan tersebut.

- TENTANG PENELITIAN KASUS tujuannya untuk mengungkap lebih luas dan lebih mendalam berbagai bentuk pembunuhan, penyiksaan dan pelanggaran HAM yang bersifat khusus dan khas.
- TENTANG PENELITIAN FORENSIK bertujuan untuk membuktikan secara forensik bagaimana bentuk-bentuk pembunuhan, penyiksaan yang dilakukan terhadap korban. Sebagai contoh adalah penggalian kemanusiaa di Wonosobo. Penggalian ini adalah Penggalian Kemanusiaan, yaitu untuk mengabulkan permintaan seorang anak korban pembunuhan 1965/1966 yang ingin memindahkan kerangka orang tuanya di pemakaman keluarga di Yogyakarta.

YPKP berusaha menyenggarakannya dan instansi pemerintah terkait membrikan izin penggalian berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Penggalian ini dilihat dari kerja Penelitian YPKP dapat membuktikan kepada semua pihak bahwa penelitian dasar YPKP yang semula diragukannya sejumlah kerangka manusia di sebuah hutan di Wonosobo. yang tempat itu adalah bukan kuburan umum. Pendapat masyarakat yang menyaksikan penggalian tersebut juga mulai terbuka bahwa ternyata PKI yang dibunuh, bukan sebaliknya PKI yang membunuh.

4. *Pelajaran dari Korban*

Maksud pemakaman kembali kerangka yang telah digali di Wonosobo, yang tidak diambil oleh keluarganya ke Kaloran karena: **Pertema**: tempat di hutan Situkup bukan tempat kuburan umum, dan **Kedua:** adanya wakaf tanah dari pihak IRAWAN untuk tempat pemukiman kerangka tersebut di atas. Sekiranya hutan Situkup adalah tempat pemakaman umum maka tidak perlu ada penguburan kerangka di Kaloran. Temanggung. sebab otomatis kerangka-kerangka tersebut akan diumumkan kembali di sana.

Ternyata rencana tersebut gagal karena beberapa hal sebagai berikut:

1) YPKP tidak/kurang mempertimbangkan suara-suara sumbang yang muncul di tempat itu. Terlalu over confidence. kurang berhati-hati sementara pengurus YPKP.
2) Minimnya informasi tentang keadaan yang sesungguhnya pada tiap-tiap daerah.
3) Kurangnya sosialisasi maksud pemakaman kepada masyarakat secara intensif. Komunikasi horisontal dengan pemuka-pemuka setempat

di bawah masih kurang.

2) Kekuatan ORDE BARU masih ikut di sementara banyak kota-kota di Indonesia; yang hendak membuat keributan di mana-mana untuk memukul pemerintahan GUS DUR.

Apa yang terjadi di Kaloran itu bukan karena Pimpinan YPKP setempat kurang mensosialisaikan rencana pemakaman kembali, tetapi memang ada usaha-usaha berencana untuk menggagalkan peristiwa ini.

Teror terhadap Pak IRAWAN adalah sasaran sementara. Sasaran yang sesungguhnya ialah dibubarkannya YPKP. Karena kalau usaha YPKP berhasil melakukan penelitian, maka akan dapat diketahui siapa yang harus bertanggung terhadap jawab perbuatan itu di depan hokum. Sebagai contoh pengalaman peresmian YPKP Pemalang tanggal 26 Maret 2001. Teror di Banjarnegara setelah selesai deklarasi. YPKP Banjarnegara satu tahun yang lalu, Aliansi Pemuda Islam (API) demo ke DPRD menuntut YPKP Banjarnegara dibubarkan. Juga di Tengerang KAK (Kesatuan Anti Komunis) mendatangi kediaman Ibu Sulami dan tak lama kemudian ada percobaan pembakaran kediamannya.

PENYELESAIN PERISTIWA KALORAN/ PAK IRAWAN

1) Peristiwa Kaloran itu sendiri pada pokoknya dapat dikatakan telah selesai, dengan telah membubarkan dirinya FUIK (Forum Ukuwak Islamiyah Kaloran). Seperti diketahui, FUIK inilah yang melakukan terror di Kaloran guna menggagalkan pemakaman kembali kerangka dari Wonosobo.
2) Perkembangan situasi yang demikian tak dapat dipisahkan dari usaha YPKP Pusat menemui KOMNAS HAM tanggal 3 April 2001 mengirim Surat kepada Polres di Temanggung untuk mengusut tindakan teror di atas. Juga bantuan dari peranan NU, PKB, Laskar yang membantu menenangkan suasana di tempat.
3) Penyelesaian hal tersebut, tentu baru akan terwujud bila Pak Irawan sendiri telah kembali di rumah Kaloran. Cepat atau lambatnya hal itu terealisasi tergantung dengan membawa salinan surat dari Komnas HAM tertanggal 3 April tersebut.
4) Masalah penguburan kembali kerangka di Kaloran itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab Departemen Penelitian. Hanya khusus mengenai penggalian kerangka di Wonosobo tersebut hal itu ditangani oleh Departemen Advokasi. Karena Departemen Hukum dan Advokasi telah keluar dari YPKP, maka persoalan kaloran ditangani oleh YPKP.
5) Diadakannya kembali Departemen Hukum dan Advokasi belum mendesak karena pekerjaan YPKP untuk seterusnya pada bidang penelitian.

Departemen Hukum dan Adokasi diperlukan bagi kepentingan membela hak-hak sipil dan perdata para korban dan keluarganya atau hal yang terjadi, dengan adanya program penelitian YPKP.

5. *Tentang Doktrin Kesalah Pahaman*

Bahwa selama ORDE BARU masyarakat telah dicekoki dengan kesalah-pahaman. Kesalah pahaman itu selalu didoktrinkan sebagai suatu kebenaran. Yang dimaksudkan dengan kesalah pahaman tersebut ialah tentang siapa sesungguhnya yang terjadi dalam G 30S. di bawah kekuasaan SUHARTO (ORDE BARU) selama 32 tahun terus menerus dicekoki, dibohongi bahwa PKI-lah dalang G 30S. di tempeli "PKI", menjadilah sebutan G. 30. S./PKI. Dalam melakukan propaganda bahwa PKI yang menjadi dalang G 30S tersebut, Suharto berpegangan pada filsafat Dr. Joseph Goebbels, menteri Propaganda Hitler, yaitu ulangilah kebohongan itu tanpa berhenti sejenakpun dan ia akan dan ia akan berakumulasi sehingga menjadi kebenaran.

Padahal sessungguhnya dia sendirilah yang menjadi dalang G. 30 S. Hal tersebut bisa kita lihat dari beberapa contoh di bawah ini:

1. Kesaksian SUBANDRIO "Pelaku G 30S adalah tentara dan gerakan itu didukung oleh SUHARTO yang juga tentara.
2. Pledoi Kolonel LATIEF: Jendral SUHARTO terlibat langsung dalam G.30.S: Jendral Suharto kemudian memimpin langsung penggulingan Presiden Sukarno (Pen. ISAI hal 22)
3. penilaian HASYIM WAHID "Karena kuatnya pengaruh SOEKARNO, maka digunakan teori Domino untuk menggulingkan SOEKARNO. Yaitu pertama-tama dengan menghancurkan Pendukung utama SOEKARNO yaitu PKI. Dengan menghancurkan pendukung utama SOEKARNO akan yaitu PKI. Dengan logika bila PKI hancur maka kekuatan SOEKARNO akan hancur. Melalui sebuah rekayasa politik dengan menggunakan NU untuk menghancurkan PKI. Setelah berhasil menghancurkan PKI. Kemudian kekuatan NU sendiri dilemahkan dan dipecah Belah.

6. *HATI-HATI DALAM MEMILIH KAWAN DAN MEMILIH TENAGA SUKARELAWAN*

Hampir saja YPKP akan menjadi rusak, apabila tidak dengan cepat mengambil keputusan dengan siapa YPKP berpartner dan mencari tenaga kerja Sukarelawan. Mulai sekarang harus lebih hati-hati dan teliti sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan organisasi baik di pusat maupun di daerah. Untunglah dalam waktu yang tepat dapat dibenahi organisasi YPKP sehingga bahaya perpecahan bisa dihindari. Lihat saja kasus kepentingan penggalian kuburan massal di Wonosobo dan penggalian rencana YPKP blitar yang memanipulasi YPKP Pusat hendak

menggali kuburan massal di Blitar.

7. *Hati-hati Jauhkanlah Rasa Puas Diri dan Kenali Situasi*

YPKP dalam perjalanan hidupnya yang dua tahun telah mengalami banyak tantangan dan rintangan, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Dalam batas-batas tertentu YPKP berhasil mengatasi rintangan demi rintangan yang menghadangnya.

Pengalaman menunjukkan jika YPKP dengan secara khusus menanggapi sesuatu informasi dan sungguh-sungguh berpegangan pada Anggaran Dasar dan hati-hati dalam mengeterapkannya, tentu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengalaman lain juga menunjukkan rasa puas diri atau kepercayaan ini yang berlebihan pada sementara kalangan kita. Hal ini tercermin dari meremehkannya suara sumbang yang masuk, dengan menilainya sebagai hal-hal yang tidak ada artinya apa-apa. Padahal kekuatan Orde Baru dengan kroni-kroninya dalam usaha menjatuhkan Gus Dur hendak menggalang kisah di tahun 1965.

Dengan belajar dari pengalaman dua tahun ini, YPKP harus berpegang teguh pada Anggaran Dasarnya sendiri dan dalam mengharapkanya supaya lebih berhati-hati. Hendaknya tenaga yang hendak mengabdi pada maksud dan tujuan YPKP didirikan, yaitu membantu pemerintah RI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk meningkatkan kesadaran berpolitik dari bangsa.

8. *Penggalian Dana dan Penelitian*

Sebagaimana diketahui bahwa YPKP adalah satu. Artinya pekerjaan YPKP di seluruh Wilayah Indonesia yang terdapat korban tragedi kemanusiaan tahun tahun 1965/1966 adalah wilayah kerja YPKP. Di dalam pekerjaan yang besar tadi YPKP telah membentuk jaringan Penelitian yang berupa relawan-relawan, baik yang berada di Cabang maupun di wilayah kerja YPKP. Di dalam pekerjaan yang besar tadi YPKP telah membentuk jaringan, pasti terlebih dahulu mempertanyakan, apakah daerah / wilayah siap menjadi relawan. Konsekuensi dari kesediaan tersebut maka pekerjaan YPKP harus seragam antara daerah dan pusat. Jadi kalau ada daerah yang tidak mengikuti garis kebijaksanaan Pusat persoalannya menjadi lain. Pintu terbuka baginya untuk mengundurkan diri.

YPKP dalam melakukan pekerjaan penelitian adalah berdasarkan Program/Rencana Jangka Pendek dan Jangka panjang yang telah dituangkan dalam proposal. Kalau daerah hendak mengadakan kerja sama dengan LSM baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah sangat baik dan pusat sangat mendukung. Akan tetapi kembali prosedural

kerja sama tersebut dengan persetujuan/ijin dari pimpinan pusat. Kalau YPKP daerah merasa keberatan dengan cara yang demikian, itu namanya bukan YPKP lagi. Tentang pelaksanaan penelitian akan diselenggarakan oleh masing-masing daerah, YPKP pusat hanya mengawasi supaya pekerjaanya tidak menyimpang dari tujuan awal.

YPKP pusat sangat menghargai koreksi langsung, tepat waktu dan tepat dari pada penyebar issue yang belum tentu benar pada waktu dan tempat yang salah.

YPKP daerah yang mepunyai prakarsa untuk menggali dana, pada daerah masing-masing untuk keperluan operasional YPKP daerah masing-masing tidak dilarang. Tentu saja dengan ketentuan pendapatan dana yang diperoleh melalui prakarsa itu jangan sampai mengikat, sehingga YPKP hilang kebebasannya dalam menentukan langkah, apalagi bila timbul issue tentang YPKP. Supaya dihindari timbulnya issue yang negatif itu.

9. *Petunjuk Tehnis Penelitian*

Hampir seluruh wilayah menghendaki supaya dibuat petunjuk tehnis tentang penelitian, sehingga ada keseragaman untuk seluruh wilayah penelitian YPKP. Saran tersebut akan segera ditindak lanjuti oleh Departemen penelitian semoga dalam waktu yang tidak lama akan segera direalisir. Sebab masih banyak kerancuan dan keragu-raguan antara korban meninggal ditembak. hilang atu dianiaya dengan korban meninggal setelah dibebaskan dari tahanan, termasuk kategori formulir A atau formulir B dan masih banyak pertanyaan yang lain.

Kesimpulannya adalah perlunya diberikan Kursus Dasar Penelitian dan pengisian Formulir untuk semua jaringan.

10. *Petunjuk Tehnis penelitian*

YPKP telah mendapat perhatian oleh kawan-kawan yang masih tinggal di luar negeri. Mereka sangat menyambut baik langkah konkrit pekerjaan YPKP yang masih dilakukan sekarang ini. Hal itu bukan saja dibuktikan dengan kunjungan MME Mitterand ke YPKP, juga dengan adanya pemberian AWARD kepada IBU SULAMI, dari Tji Haak Soon Korea. Juga banyaknya undangan pada YPKP untuk terlibat dalam pertemuan-pertemuan Internasional. Termasuk sekarang ini salah seorang Pengurus YPKP Bapak KUSALAH SUBAGYO TOER mendapat undangan ke negeri Belanda.

11. *Menanggapi Situasi Sosial Politik Pemerintahan*

YPKP sebagai yayasan yang berazaskan pancasila dan UUD 1945 senantiasa mengambil sikap mendukung pemerintahan yang hendak

menegaskan pancasila dan UUD 1945, artinya pemerintah yang menegaskan demokrasi, keadilan dan HAM.

Sebagai konsekuensinya tentu saja YPKP akan menolak setiap usaha dari manapun datangnya yang hendak mengebiri Pancasila dan UUD 1945, yang hendak melumpuhkan demokrasi dan keadilan hak asasi manusia.

Mendukung terhadap setiap langkah yang hendak menegakkan Pancasila dan UUD 1945, yang hendak mengakkan demokrasi, keadilan dan hukum serta hak asasi manusia. Sebaliknya menolak setiap usaha yang hendak mengebiri Pncasila dan UUD 1945, yang hendak melumpuhkan demokrasi, keadilan dan hak asasi masusia. Ini tidak dalam arti YPKP terjun langsung dalam aksi-aksi politik massa. YPKP bukan partai politik, YPKP adalah yayasan penelitian dimana titik berat aktivitasnya adalah pada penelitian.

Pemerintah Gus Dur dengan gagasannya untuk mencabut TAP MPRS XXV/1966, adalah pemerintahan yang hendak menegakkan Pancasila dan UUD 1945, sebaliknya pihak yang menolak gagasan Gus Dur itu adalah hendak mempertahankan tetap berlakunya pemerintahan Orde Baru yang anti Pancasila dan UUD 1945.

Jakarta 27 mei 2001

Pengurus Pusat,
Pjs. Ketua

(Hasan Raid)

Sekretaris,

(Suharno)

Rapat Kerja Nasional
Cisarua, 11-12 Februari 2002

"Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh" inilah kata-kata yang mengakhiri pidato sambutan Ketua Umum YPKP, Sulami, kepada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan di Wisma "Dirga Cibulan", Cisarua-Bogor, tanggal 11-12 Februari 2002. Kata-kata itu menjadi peringatan seluruh relawan YPKP untuk tidak ikut terseret dalam perpecahan yang kini menjadi "mode" di kalangan kelompok masyarakat, LSM, Ormas, Orpol, bahkan dikalangan pemimpin bangsa, hingga muncul istilah disintegrasi bangsa untuk untuk mengindikasikan terjadinya perpecahan di tengah bangsa Indonesia.

SULAMI mengajukan kepada peserta Rakernas Untuk berpegang pada "cita-cita semula" seperti tercantum dalam Anggaran Dasar YPKP. "Jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri". Kita harus menyatukan langkah dan persepsi, atas dasar aturan yayasan yaitu kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.

SULAMI mengingatkan bahwa musuh kita yang paling utama ialah penguasa yang pernah membasmi, menyiksa, membunuh kita, yakni rezim SUHARTO", yang sampai sekarang masih terus mengganggu dan menghalang-halangi aktivitas YPKP baik di pusat maupun di daerah. Dicontohkannya Komando Jihad di kantor YPKP di Tangerang, lalu di bakarnya Kantor YPKP oleh pihak yang belum diketahui identitasnya itu. Disinggungnya peristiwa Kaloran di Temanggung yang menimbulkan penderitaan baru pada relawan YPKP, antara lain pada keluarga Bapak IRAWAN. Disebut juga gangguan penguasa di tempat-tempat lain lagi. Tapi SULAMI pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak aparat setempat yang dengan penuh pengertian ikut serta membantu perjuangan para relawan YPKP.

Rakernas YPKP untuk Jawa, Bali dan Sumatra kali ini dihadiri oleh 10 (sepuluh) Perwakilan YPKP (daerah tingkat I) di tingkat propinsi, yaitu : Bali, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatra Utara.

A. VISI DAN MISI YPKP

Sambutan berikutnya diberikan oleh Pejabat Sementara Ketua Umum YPKP, HASAN RAID, yang diawali dengan uraian tentang Visi dan Misi YPKP, untuk kembali mengingatkan hadirin pada pasal 3, 4 dan 5 Anggaran Dasar YPKP.

Pasal 3, menyebutkan bahwa "yayasan ini berazaskan Pancasila menurut arti serta makna yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, berikut ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945 dan penjelasannya".

Pasal 4, menyebutkan (a) membantu Pemerintah RI dalam usaha ikut mencerdaskan bangsa guna mewujudkan masyarakat Pancasila seutuhnya. (b) berusaha berdasarkan kemampuan yang ada dalam mengamalkan Pancasila serta UUD 1945 dalam kehidupan bernegara berbangsa dan bermasyarakat Pancasila secara murni dan konsekuen". Dan selanjutnya disinggung empat pokok usaha yang dilakukan oleh YPKP, khususnya:

Mengumpulkan literatur-literatur, mencari informasi-informasi, menerima informasi, mencari saksi mata, menghubungkan keluarga-keluarga korban, melakukan penelitian di lokasi-lokasi yang diperkirakan ada korban pembunuhan, dan bekerja sama dengan dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian Korban pembunuhan tahun

1965/1966, termasuk lembaga hukum dan sejarah."

Hasan Raid menjelaskan secara rinci, apa yang dimaksud dengan pasal-pasal tersebut.

B. Kerjasama Dengan pihak Lain

YPKP bekerja sama dengan LSM lain "sejauh tidak bertentangan dengan azas dan tujuan YPKP", demikian Hasan Raid mengenai Kemungkinan kerja sama dengan pihak lain, khususnya dalam meneliti korban Peristiwa G 30S. Tapi, tidak berarti bahwa YPKP "tidak memperhatikan pula korban-korban ORDE BARU yang lalu" Contoh kerja sama ini adalah dengan Pakorba.

Namun kerja sama itu syaratnya, kerja sama itu bukan penggabungan. Kerja sama dilakukan karena adanya kepentingan bersama, kerja sama pun perlu dilakukan".

Dalam kaitan ini, Hasan Raid mengingatkan, tidak diperkenankan merangkap kepengurusan di dua LSM, satu antaranya di YPKP. Alasannya, "seorang akan dapat bekerja lebih intensif, jika ia menekuni satu lembaga saja, karena merangkap dalam lembaga yang lain, apalagi bila perangkapannya dalam kepengurusan."

Dalam kaitan ini juga Hasan Raid mengingatkan, bahwa YPKP bukan partai politik dan juga bukan *under bouw* partai politik. Walau demikian, sejalan dengan prinsip YPKP bahwa relawan YPKP bebas untuk masuk atau keluar dari YPKP, relawan YPKP dapat melaksanakan hak Azasinya untuk menjadi anggota suatu partai.

C. Penelitian

Selanjutnya hasan Raid memaparkan tentang seluk beluk pelatihan, penelitian dan pengumpulan data. Pelatihan dan penelitian telah dilakukan di beberapa tempat di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung.

Dari pengalaman itu diperoleh kesan, ada pihak-pihak aparat yang menganggap kegiatan YPKP cenderung tertutup. Mereka curiga, karena kebanyakan relawan YPKP adalah eks korban peristiwa 1965/1966.

Hasan Raid menegaskan, YPKP adalah organisasi terbuka, bukan tertutup. Penelitian yang dilakukannya resmi dan terbuka, walau "tatkala petugas atau relawan YPKP sedang melakukan investigasi dengan respondenya, tak layak dan tak boleh hadir pihak ketiga".

YPKP dengan penelitiannya hendak menegakkan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Sebenarnya merupakan tugas pemerintah, untuk melakukan penelitian ini. Karenanya sudah sewajarnya kalau aparat pemerintah membantu usaha YPKP dalam melakukan penelitian

korban pembunuhan tahun 1965/1966.

Oleh karena itu, diwaktu yang akan datang, dalam melakukan mensosialisasikan visi dan misi YPKP beserta tehnis pelaksanaanya, "kita tetap harus memberitahukan secara resmi kepada pemerintah setempat".

Umumnya setelah mendapat penjelasan tentang arti penelitian itu, terutama bagi generasi penerus bangsa aparat "kelihatannya dapat memahaminya", demikian ungkap Hasan Raid.

Biaya Penelitian.

Hasan Raid menyinggung masalah biaya penelitian yang antara lain diberikan oleh penyandang dana.

Khususnya ia berbicara tentang masalah biaya penelitian yang antara lain berkembang di kalangan relawan YPKP. Hal itu dikatakannya, karena belum adanya penjelasan yang memadai tentang seluk beluknya.

YPKP transparan dalam menggunakan dana dari penyandang dana bagi keperluan penelitian. YPKP dalam menggunakan dana bagi penelitian, senantiasa bertolak dari ketetapan-ketetapan yang dibikin penyandang dana. Pembukuan YPKP dipertanggung-jawabkan secara "Akuntan Publik", demikian Hasan Raid. Selanjutnya, Hasan Raid mengajak para peserta Rakernas membahas bersama program-program/anggaran pelatihan yang akan dipandu oleh Ketua Departemen Penelitian, Yusuf Suwadji.

Program/Anggaran Penelitia.

Selanjutnya RAKERNAS membicarakan program/anggaran penelitian. Didahului dengan penjelasan dari ketua Departemen Penelitian tentang jenis-jenis penelitian, yaitu:

1. Penelitian Dasar
2. Penelitian Khusus
3. Penelitian Forensik

Dilanjutkan tentang apa saja yang ingin diketahui dalam penelitian itu, seperti berapa jumlah korban, siapa yang membunuh, dengan apa dibunuh, kapan dibunuh, dengan cara bagaimana dibunuh, adalah pembunuhan di luar perikemanusiaan, bagaimana korban dibuang atau dikubur.

Semua itu tertuang dalam perangkat formulir A, formulir B dan formulir C, yang kini dalam proses disebarkan ke jaringan-jaringan YPKP di Jawa, Bali dan Sumatra.

Pelatihan untuk penelitian dan pengumpulan data dilakukan di tingkat perwakilan (propinsi) dan ditingkat cabang (kabupaten). Ditekankan pentingnya jaringan relawan sebagai ujung tombak pengumpulan data.

Selanjutnya diuraikan tentang biaya yang diperlukan beserta rinciannya.
Disusul dengan laporan daerah-daerah tentang kondisi masing-masing meliputi hal-hal yang bersangkutan dengan kemungkinan pelatihan dan penelitian . Jawa Tengah diwakili oleh Sigit, Jawa Timur diwakili oleh Budi, Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Sunarman, Banten diwakili Somad dan Dewi Wahyuni, Sumatera Utara oleh Sumarnata, Lampung diwakili oleh Suprijadi, dan Sumatera barat diwakili Oleh Ibu Nadiani. Juga laporan dari Departemen lain.

Departemen Organisasi	: oleh Sunarno
Departemen Sjarah	: oleh A. Pudji Rahardjo
Departemen Humas	: oleh Kusalah Subagyo Toer

Sunarno berbicara tentang pentingnya Departemen Organisasi yang harus menjadi ujung tombak penelitian, karena itu harus ada kerja sama yang erat dengan Departemen Penelitian, A. Pudji Rahardjo juga menekankan pentingnya dokumentasi di samping masalah sejarah.

Hubungan Masyarakat

Ketua Departemen Humas mengeluarkan seluk beluk humas YPKP. Berbicara tentang program dikemukakannya antara lain perlunya ditekankan bahwa prinsip Departemen Humas YPKP adalah:

1. Swakelola dan swadana dalam managemen, walau selalu terbuka kemungkinan bagi dukungan sumbangan dan pertolongan dari luar.
2. Hubungan dengan sekretariat YPKP bersifat organisatoris, yang berarti bahwa Departemen Humas adalah pelaksana dari program-program dan kegiatan-kegiatan YPKP pada umumnya.
3. Setiap anggota staf adalah sekaligus pejabat yang bertanggung jawab, wartawan dan distributor produk-produk Departemen Humas.

(SK. No. 02 Tahun III Februari 2002)

XI. Soal Kontrak Dengan HOM Di Belanda

Mengenai kontrak dengan HOM (Humanistisch Overleg Mensenrechten) di Belanda ini, Ibu Sulami sangat kecewa sekali, karena merasa ditinggalkan (selaku Ketua YPKP 65/66) oleh PJS Bp. Hasan Raid. Mungkin alasan PJS Hasan Raid karena Ibu Sulami masih sakit, namun kenyataan Ibu Sulami

sudah bisa berbuat/bertindak untuk diajak diskusi, sekalipun di atas kursi roda. Dalam pembuatan Kontrak kerja sama dengan HOM tersebut adalah "cacad hukum" (bisa baca pada surat Martha Majer terslampir, disamping prosedur penanda tanganan kontrak tidak sah dan tidak pernah didiskusikan dalam forum Badan Pendiri yayasan, siapa-siapa yang seharusnya/ditunjuk sebagai penanda tangan kontrak kerja sama dengan HOM tersebut)

Mengenai isi kontrak kerja sama, bisa diteliti pada pada pasal 10 dan 11, disini isinya sangat mengikat sekali, seolah-olah karena hanya sebagai penjual barang/jasa saja kepada HOM/Pemerintah Belanda, dan untuk jelasnya bisa dipelajari isi kontrak kerja sama berikut tanggapan dan kritik dari akar rumput organisasi sebagai berikut.

SURAT-SURAT PERNYATAAN

Dari : YPKP 1965/1966 Perwakilan TK I Jawa Timur

Kepada Yth
Pengurus YPKP 1965/1966
Di Jakarta

Dengan Hormat,

I. Menyusul surat kami yang pertama tentang pengajuan Proposal: Rencana Kerja YPKP Jawa Timur, Jangka pendek dan besarnya anggaran untuk TK II Banyuwangi, TK II Blitar dan biaya oprasional, perwakilan TK I Jawa Timur, terkirim oleh Sekretaris Jawa Timur Budi Rahardjo, diserahkan langsung ke tangan langsung Yusuf Suwadji di Jakarta pada bulan Oktober 2001.

Kami tunggu sampai akhir Desember 2001 tak ada tanggapan alias di PETIESKAN tak ada informasi atau komunikasi yang lain yang bersifat penjelasan atau yang lain-lain. Untuk hal tersebut kami sangat menyayangkan sikap YPKP-Pusat yang lamban, kurang mendengar suara bawah. Sikap tersebut berakibat cukup berat bagi perwakilan TK. I yang secara langsung terbebani oleh tanggung jawab moral terhadap daerah-daerah TK.II yang selama ini sudah terkonsolidasi, terorganisasi dengan baik, dan selalu daerah-daerah tersebut harus tetap terkoordinir dengan baik.

Tetapi, sikap pusat yang terkesan lamban dan *vacum* kebijakan, terutama pada periode-periode Agustus sampai dengan Desember ini TK. I juga menahan diri untuk mendorong daerah-daerah melakukan konsolidasi untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerja sampai ke tingkat-tingkat kecamatan dan ini akibatnya cukup memprihatinkan,

daerah-daerah kehilangan gairah dan semangatnya sehingga TK.II praktis tidak bergerak. Tentu ada pertanyaan: mengapa TK.I harus menahan diri? Tidak dilanjutkan saja? Ada hal-hal penting yang mendasar yang oleh teman-teman atau bapak-bapak pengurus pusat perlu memahaminya.

Pemikiran, pertimbangan-pertimbangan serta kesimpulan yang dihasilkan dari pengamatan berdasarkan laporan, akan sangat berbeda bobot obyektifnya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diperoleh dari pengalaman langsung di lapangan.Itu yang membedakan sering timbulnya perbedaan-perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, sebab daerah mengambil kebijakan secara obyektif sebab memungkinkan kondisinya, karena berada di lapangan, sedangkan pusat mengambil kebijakan secara subyektif, karena memang jauh dari praktik lapangan. Oleh sebab itu, sering terjadi, Pusat kesulitan untuk belajar memahami kebijakan-kebijakan daerah, dan tentu karena tidak memahami obyektifitas daerah, pertimbangan intelektual yang penuh dengan muatan subyektif yang dipakai. Hasil keputusannya menjadi tidak sejalan dengan keinginan daerah, dan mengecewakan daerah. Padahal basic materi yang diperlukan untuk YPKP 1965/1966 99% berada di daerah. Di daerah, kalau YPKP 1965/1966 ingin bershasil, bukan terletak pada hebatnya modal/dana yang diperoleh oleh pusat, tetapi oleh keinginan daerah yang beraneka ragam dan tidak sistematis ini menjadikan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan yang menyatu dan sistematis lalu dikembalikan persoalannya, untuk melaksanakannya, dan tehnik ini pasti berhasil. Sekarang keadaannya sudah berbalik, dari pusat yang sampai ke daerah-daerah menjadikan uang faktor yang primer, sedangkan manusianya menjadi factor yang sekunder, ada jaringan-jaringan, ada orang-orang yang mengerjakan, kalau uang tak cukup, pasti usaha penelitian ini tidak akan berjalan.

Ingin bukti, bahwa manusia pernah menjadi primer?

Mari kita menoleh ke belakang, tanpa uang sepeserpun dari pusat yang dipakai untuk membiayai daerah, daerah-daranh mengumpulkan data-data korban melalui formulir A, B C dalam bentuk formulir yang lama.

Dengan semangat Relawan. Bekerja, siang, bahkan malam, untuk mencari teman-teman yang masih hidup untuk diajak membangun jaringan-jaringan kerja YPKP 1965/1966. Semua dikerjakan dengan kesadarn relawan, tanpa ada motivasi uang balik yang dikerjakannya ini. Justru uang-uang pribadi yang banyak dikorbankan dengan semangat, dan jiwa rela berkorban.

Mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi? Sebab di dalam jiwa teman-teman relawan ini ada roh perjuangan dari semangat perjuangan para korban yang rela mati untuk perjuangan, dan kita masih ada tertanam roh/jiwa perjuangan itu, maka disamping terkumpul formulir-formulir ABC/...., terbangunlah jaringan-jaringan komunikasi antar kawan melalui bentuk organisasi TK. I dan TK.II bahkan sampai pada kecamatan-kecamatan.

Tetapi kondisi yang pernah kerelaan perjuangan ini menjadi surut, susut manakala melihat teman-teman yang dipusat tidak menyambut, memahami semangat perjungan daerah ini, bahkan terkesan YPKP 1965/1966 pusat kelakutan kalau YPKP 1965/1966 berubah menjadi kekuatan yang terorganisir dan disalah gunakan oleh unsur-unsur yang tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan. Sebab yayasan ini (YPKP 1965/1966) bukan bertujuan untuk membangun organisasi massa, tetapi penelitian korban 1965/1966 secara profesional yang dipertanggungjawabkan untuk meluruskan sejarah.

Tujuan YPKP 1965/1966 tersebut bukanlah hal yang tidak diterima oleh daerah-daerah, karena itu sudah menjadi landasan dari gagasan terbentuknya YPKP 1965/1966, tapi justru mendapat sambutan yang sangat antusias dari daerah-daerah, karena melalui YPKP 1965/1966 diharapkan dapat memunculkan suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu korban yang sudah di vonis oleh sejarah bikinan ORDE BARU sebagai pembrontak dan pengkhianat Pancasila, dapat dibuktikan dan diluruskan kembali, ternyata korban-korban itu rekayasa SUHARTO dan ORDE BARUNYA, oleh sebab itu, daerah-daerah sangat semangat untuk mendukung dan melaksanakannya.

Tetapi momentum yang bagus ini, sekarang sudah menurun sangat tajam, terlebih lagi ketika pusat mengambil keputusan untuk mendata ulang dengan formulier yang baru, sebab secara tak langsung pusat sama sekali tidak memperhitungkan betapa untuk menjalankan formulir lama atau baru, tapi adalah begitu mudahnya mengambil keputusan untuk mengganti, dengan konsekuensi harus mendata ulang dan bahkan muatan-muatan informasi yang diperlukan oleh formulir baru jauh lebih banyak, rinci dan yang *accuratien*-nya sangat tingi. Untuk belajar memahami formulirnya saja sudah kesulitan, apalagi melaksanakannya. Namun, bukan berarti tidak bisa dijalankan, bisa dilaksanakan, tapi harus didahului adanya pelatihan-pelatihan dulu. Saat ini pengenalan formulir baru di Sukabumi sekaligus pelatihan, itu saja banyak utusan-utusan daerah yang harus berulang-ulang bertanya dan minta penjelasan-penjelasan, bisa dibayangkan kalau formulir itu langsung saja dijalankan tanpa pelatihan dulu, pasti sangat banyak terjadi kesalahan-kesalahan, dan konsekuensi yang tragis adalah, sasaran yang diharapkan tak dapat dicapai, yaitu tingkat kuantitatif dan yang juga penting adalah kwalitatifnya. Akibatnya formulir yang sudah dijalankan tidak menjawab tujuannya, dan ini sangat riskan, buang waktu, tenaga dan bahkan biaya yang sia-sia. Apa kemungkinan terburuk sudah di antisipasi oleh pusat? Saat sekretaris Jatim menyampaikan laporan bahwa: TK. II Banyuwangi sudah berhasil menyelenggarakan pelatihan, yang diikuti ± 80% utusan dari kecamatan, apa jawaban bung Yusuf Suwadji?

Sebenarnya Pelatihan itu tidak perlu !

Padahal. saat pelatihan di Sukabumi Bung Yusuf menganjurkan untuk mengadakan pelatihan TK. II – lalu peserta Banyuwangi, setelah pulang, pulang di Banyuwangi berkoordinasi dengan pengurus-pengurus lainnya, lalu dilaksanakan. Berhati-hatilah dalam mengambil kebijaksanaan – jangan ada kesan. Pusat seenaknya sendiri. Keputusan –keputusan yang diberikan sangat subjektif, sebab itu bisa berubah-uabah sesuai subjektifnya. Tergantung situasinya. Jawaban tersebut sangat melemahkan semangat daerah-daerah. Seakan-akan apa apa yang sudah dikerjakan itu sia-sia dan tak perlu. Tak punya arti apa-apa. Berhati-hatilah ucapan seorang pemimpin. Pemimpin harus mampu membangun Motivasi, bukan sebaliknya, justru menghancurkannya.

Gaya atau Still dari kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya suatu kegiatan bawah. Jadi apa inti sebenarnya dari uraian di atas? Berikut inilah jawabannya:

1. YPKP 1965/1966 sangat lemah dalam management, terkesan yayasan yang memerlukan Persosonil-personil Profesional, ahli organisasi, perencanaan dan akuntansi, dalam implementasi praktik konkritnya tak nampak sama sekali. Maksudnya secara *Macro Polecy*, yang seharusnya menjadi pedoman kerja bawah tak pernah ada, yang kami lihat dan dengar adalah penyajian teori dan ide-ide. Tapi bagaimana cara mencapai/mewujudkan ide-ide itu tak ada penjelasannya padahal, untuk setiap tujuan tertentu ada terget lalu dijelaskan bagaimana target itu bisa dicapai? Dengan cara apa, bagaimana dan sebagainya. Lalu selalu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaanya, sesuai apa tidak, antara rencana dan realisasinya? Kalau tidak apa sebabnya? Apa ada rencana lain dan yang lebih baik? dst? Konsep kerja ini, berjalan mulai pusat sampai ke daerah-daerah. Sedang konsep membangun organisasi sampai tingkat kecamatan atau cukup jaringan kerja saja. Ini saja tak pernah jelas, selalu keduanya yang muncul di lapangan praktek, sangat tidak consistent.
2. Setiap rencana kerja atau perubahannya, sosialisaikan dulu ke seluruh daerah-daerah, sehingga daerah dapat memahami, apa yang berubah, mengapa berubah? Kapan mulai berlaku dan seterusnya.
3. Pusat harus membangun sistem dan mekanisme kerja yang standar, sebagai acuan kerja dari pusat sampai ke daerah-daerah. Inilah cara kerja yang professional.
4. Tujuan Penelitian adalah mendapatkan data yang *acuratien*-nya dapat dipertanggung-jawabkan, dan data ini tentu diseluruh wilayah Indonesia. Diseluruh wilayah Indonesia bukan dibeberapa TK.II saja. Apakah itu Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Seluruh Indonesia terdapat ribuan TK.II. Tanpa seluruh Indonesia, data itu akan sia-sia, untuk menjawab

beberapa jumlah korban 1965/1966 di Indonesia? Itu saja tak terjawab, muncul data hanya sebatas pada daerah-daerah yang sudah ada jaringannya saja. Itupun sekarang hanya beberapa TK.I saja yang ada YPKP 1965/1966, ±70% belum terjangkau!

- Tapi konsep pengembangan untuk memenuhi target itu tidak pernah ada, program organisasi ke seluruh Indonesia tak pernah tergambarkan, kami menjadi ragu, YPKP 1965/1966 benar-benar ingin meneliti korban secara benar apa tidak? Berapa jumlah korban di seluruh Indonesia?
- Kami ragu YPKP 1965/1966 sekedar alat sementara, bagi broker-broker untuk mencari uang ke luar negeri. Setelah dapat, tak perlu seluruh Indonesia, pokoknya ada data yang bisa dilaporkan penyandang dana di luar negeri sebagai laporan pertanggung-jawaban atas uang yang sudah disumbangkan ke YPKP 1965/1966 di Jakarta.
- Lalu cari lagi ke : penyumbang yang lain, dan langkahnya, tetap sama tak perlu ada organisasi seluruh Indonesia, pokoknya, ada data pelaporan dari beberapa daerah saja cukuplah. Untuk laporan pertanggung-jawaban kepada pengirim dana. Hal ini tampaknya benar, sah-sah saja. Perkara dana yang sudah diterima, daerah tak perlu ikut-ikut, itu kan wewenang pusat. Dana terpakai secara JUJUR 100% untuk YPKP 1965/1966, atau tidak, toh daerah-daerah tak akan tahu? Sedangkan penyandang dana, dikirimi laporan-laporan seadanya, toh juga tak akan tahu.
- Oh, kalau analisa pengamatan ini benar demikian, betapa rendahnya martabat kita di hadapan nyawa korban-korban yang sudah mati. Jadi mornen korban 1965/1966 itu kita jadikan komoditi untuk dijadikan cari uang saja.
- Sungguh kalau hal ini benar, dan lalu sampai diketahui di dengar oleh orang-orang/sekelompok di luar YPKP 1965/1966, sungguh akan menjadi petaka besar, bagi moral, generasi penerus para korban. Semoga apa yang kami sampaikan ini tidak terjadi, tapi, kalau melihat cara kerjanya, mekanismenya, hal ini yang kami sampaikan di atas bisa terjadi , kalau tidak segera sadarkan kesalahannya, dan cepat memperbaiki diri.

II. Pada bagian berikut ini akan mengoreksi cara kerja, direktur-direktur Boss-nya Departemen YPKP 1965/1966 Pusat Jakarta

- masih saja, cara-cara kasar, gaya makelar/broker model kerjanya yang dilakukan oleh Bos/direktur YPKP 1965/1966 di Jakarta. Sifat makelar/broker, selalu menyerobot dan melangkahi jalur, motivasi apa yang

mendorong melangkah demikian untuk para pembesar YPKP 1965/1966 Pusat kami tak tahu, tapi kalau "Motivasi" Broker, kami pasti tahu, yaitu ingin mendapat "Komisi yang paling besar" Caranya? Memotong jalur dengan broker-broker lain, dengan demikian, mengurangi jumlah orang yang akan terima komisi. Meskipun, jalur-jalur dari yang dipotong itu, merupakan faktor pembuka jalan. Tapi tak peduli, dasar broker, moralnya juga tetap broker. Takut kebagian sedikit, maka main serobot terus. perkara moral? Mana ada, broker yang bermoral baik? Selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Maaf kami tidak bermaksud mengatakan pengurus-pengurus pusat adalah broker, yang maksud adalah cara kerjanya ironis kalau harus menjelaskan lagi. Sudah beberapa kali, kami protes, tapi yang terjadi tetap saja.

1. Pada waktu kepala departemen organisasi baru saja dilantik, lalu memuat gebrakan untuk mewujudkan semangat kerjanya. Karena terlalu bersemangatnya dalam kerjanya sampai melupakan jalur-jalur organisasi. ya, riskan juga, direktur organisasi sampai tahu kerja dalam organisasi. Turba langsung ke daerah-daerah, meminta alamat-alamat dan nomor telepon TK. II, setelah tahu lalu berkoordinasi kunjungan. Maksudnya Turba, tapi sudah melangkahi pengurus TK. I, hal ini tidak dilakukan oleh departemen organisasi dan yang berikut oleh Ester. Waktu itu Ester menjabat Dir. Dept. Hukum/ Advokasi. Gaya potong jalur, biasa dilakkukan dalam dunia bisnis, dan ini adalah pembongkaran kuburan-kuburan di Blitar.
2. Akhir-akhir ini, sekitar akhir Desember 2001. Bossnya Dept. Penelitian YPKP 1965/1966 Pusat langsung melaksanakan penelitian di Banyuwangi. Tanpa koordinasi dulu dengan YPKP 1965/1966 TK. I Jawa Timur.
   - Sekalipun alasannya, penelitian itu kerjasama dengan Syarikat Banyuwangi, bukanlah Yusuf Suwadji, MA. Datang ke banyuwangi pakai baju direktur Dept. Penelitian YPKP 1965/1966.
   - Dan bukankah di Banyuwangi yang dikoordinasikan juga melalui personilnya YPKP TK. II banyuwangi. Lalu berdalih ini bukan proyek YPKP, lalu nyelonong langsung saja ke Banyuwangi.
   - Teman-teman banyuwangi melaporkan ke TK I Jatim. sambil bertanya. Ini cara kerja apaan? Bayangkan orang-orang TK. II saja bisa bertanya seperti itu, berarti cara kerja itu dipandang kurang benar, yang pusat justru tidak tahu aturan kerja organisasi, Dasar Mental Boker.
3. Demikian juga halnya, surat menyurat dan seterusnya. main potong dan tidak menghiraukan TK. I, Pusat langsung daerah-daerah TK. II itu sudah bukan hal yang baru. sudah biasa, pikirkanlah, pikiran, perasaan dan nilai pengurus-pengurus TK. I, kalau itu tak ada langkah-

langkah pembenahan di Pusat, karena kami merasa tidak diperlukan, kami rela membubarkan diri. Sekalipun untuk membuka daerah-daerah TK. II, kami sudah berkorban cukup besar, dengan hasil terbangunnya jaringan-jaringan ke daerah-daerah TK. II, tapi sekarang tidak diakui lagi oleh Broker. Demi menjaga moral perjuangan kami, kami rela membubarkan diri dan asset Jatim akan kami handle secara langsung berdasarkan nilai perjuangan yang bermoral kader perjuangan.

4. Ada berkembang issue/informasi ke kami bahwa Deptartemen Penelitian mendapatkan anggaran berdasarkan nilai Rp. 3000/ lembar. Kebijakan ini tanpa memperhitungkan nilai moral yang akan merusak citra pengabdian pada perjuangan yang sebelumnya sudah tergalang. Bukankah dengan nilai itu mendorong orang-orang daerah bekerja mengejar omset jumlah lembar formulir, tanpa memperhitungkan lagi tingkat acuratie

Yayasan Menjelang 6 Agustus 2002

Oleh Eryanto Nugroho

The Ministry of Low and Legislation Will form a workkiong group to policy recomendations and to draft legislation ao foundations to be submitted to Parliament by end-April 2000. The legislation will require foundation to file public statement of activities, including audites asccounts"

Demikianlah sepenggal "titah" yang dimuat dalam *Letter of Intent* antara Pemerintah Indonesia dan IMF dalam *memorandum of Economiuc and Financial Policies Medium Term Strategy and Policies for 1999/2000-2000,* tertangal 20 Januari 2000. Penggalan kalimat tersebut harus diakui yayasan yang telah disimpan sebagai draft di departement Kehakiman sejak tahun 1976. Bukan sekedar "dibangkitkan", draft RUU yang sempat terpendam lama itu mendadak meningkat akselerasi pembahasannya begitu cepat sehingga kemudian pada 6 Agustus 2001 disahkan menjadi undang-undang tanpa adanya cukup partisipasi.

Dibandingkan dengan Belanda yang telah memiliki *Wet op stichtingen* sejak tahun 1996, Indonesia memang dapat dipandang cukup terlambat dalam melahirkan undang-undang yang mengatur tentang yayasan. Selama ini yayasan di Indonesia hanya mendasarkan pada kebiasaan dan *yurisprudensi* Mahkamah Agung. Salah satu *yurisprudensi* yang kerap dijadikan rujukan ialah putusan MA pada kasus Yayasan Dana Pensiun

HBM *(Stichting Pensiunfonds HBM Indonesie)* tahun 1973 dimana dalam satu pertimbangan yang dibenarkan Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa yayasan tersebut sebagai badan hukm.

Mengingat banyaknya yayasan eksis di negara ini, lahirnya UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini jelas akan menimbulkan dampak yang sangat besar. namun demikian karena prose kelahirnnya yang tidak partisipasif, terlebih lagi karena minimnya sosialisasi tentang undang-undang ini menjelang berlakunya undang-undang ini pada 6 Agustus 2002, terlihat sekali kenyataan bahwa banyak yayasan-yayasan, baik besar maupun kecil, masih tergagap-gagap untuk menyikapi UU Yayasan ini.

Begitu banyak yayasan yang belum mengetahui hal-hal apa yang harus depersiapkan ataupun dibenahi organisasi yayasan-nya dalam menghadapi undang-undang baru ini. Mencermati kondisi tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin berbagi beberapa pemikiran penulis tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah yayasan dalam menghadapi berlakunya UU yayasan ini pada tanggal 6 Agustus 2002 yang akan segera tiba.

1. Reorientasi Pilihan Badan Hukum

Kita ketahui bersama bahwa organisasi nirlaba di Indonesia memilih badan hukum yayasan tanpa didasari pertimbangan ataupun orientasi pemilihan bentuk badan hukum yang tepat. Penilihan yayasan sebagai badan hukum untuk organisasi nirlaba di Indonesia lebih banyak didasari oleh kondisi eksternal yang sering kali mengorbankan orientasi yang sesungguhnya dari orientasi itu sendiri.

Kondisi tersebut antara lain adalah minimnya pilihan badan hukum yang tersedia untuk organisasi nirlaba, ataupun karena kondisi ketidak-jelasan aturan main dalam praktek yayasan yang kemudian dimanfaatkan untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi, baik tujuan yang positif (gerakan advokasi kebijakan, *carity*, pemberdayaan dll.) maupun untuk tujuan negatif (korupsi, lembaga *money loundring*, dll.) Oleh karena itu, sangat penting dalam menyikapi UU Yayasan ini untuk terlebih dahulu melakukan reorientasi ataupun identifikasi ualang terhadap masing-masing organisasi Sudah tepatkah pilihan badan hukum yayasan? Pertanyaan ini nampaknya sudah harus segera kita tanyakan kepada organisasi kita masing-masing.

Beberapa macam pilihan bentuk badan hukum tersedia dalam konteks hukum di Indonesia. bagi yayasan yang dalam reorientasi dan teridentifikasi menemukan bahwa ternyata sifat organisasi "yayasan"nya lebih kepada *profit oriented organization*, dapat mempertimbangkan untuk beralih bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) saja. Jika dilihat dari basis kekuatan keanggotaan *(membership based organization)*, padahal yayasan merupakan badan hukum tanpa anggota, dapat dipilih bentuk yang lebih sesuai seperti Perkumpulan ataupun koperasi.

Pemilihan bentuk badan hukum ini haruslah dilakukan dengan sangat cermat. Tindakan mengalihkan bentuk badan hukum harus didasarkan pada orientasi ataupun identifikasi terhadap kebutuhan yayasan secara mendalam. jangan sampai melakukan pengalihan bentuk badan hukum hanya untuk "melarikan diri" dari UU Yayasan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan juga dalam pertimbangan pengalihan bentuk hukum mengenai pengaturan hukum tentang badan hukum yang dituju, misalnya Undang-undang Perseroan terbatas, bentuk badan hukum yang dituju dalam peralihan tersebut perlu dikaji apakah sudah sesuai dan cukup kondusif untuk gerak organisasi ke depan nanti.

Sebaiknya sejak sekarang yayasan sudah harus berbenah diri mengenai kekayaan yang dimilikinya. Harus dipisahkan dengan tegas antara kekayaan yayasan dan kekayaan pribadi orang di dalamya. Apabila yayasan sudah memutuskan untuk berubah menjadi badan hukum lain. maka sebaiknya tindakan pembubaran yayasan dan perubahan menjadi badan hukum lain ini dilakukan segera sebelum UU Yayasan berlaku.

Hal ini disebabkan karena UU Yayasan telah telah berlaku dan yayasan yang bersangkutan termasuk dalam yayasan yang diakui sebagai badan hukum oleh undang-undang ini, maka yayasan yang bersangkutan akan terikat oleh pengaturan UU Yayasan melarang pengalihan aset yayasan untuk maksud dan tujuan selain maskud dan tujuan yayasan. Hal ini berarti aset yayasan tidak bisa dialihkan menjadi aset badan hukum baru yang didirikan organisasi.

2. Memastikan Status badan Hukum Yayasan

Apabila setelah orientasi organisasi diputuskan untuk tetap memilih badan hukum yayasan. maka hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh yayasan ialah memastikan bagaimana status badan hukumnya di hadapan UU Yayasan ketika berlaku nanti.

Ketika berlaku nati UU yayasan hanya akan menakuti sebagai badan hukum 2 (dua) kategori yayasan (1) Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.; atau (2) Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Menjadi penting bagi yayasan-yayasan yang telah mantap menggunakan badan hukum yayasan untuk memastikan status badan hukumnya. Termasuk dalam kategori yang manakah yang ingin tetap diakui status badan hukumnya, karena kalau tidak maka kita akan terpaksa mendirikan yayayasan "baru" agar tetap diakui sebagai badan hukum ketika UU yayasan ini telah berlaku.

3. Restrukturisasi Organisasi Yayasan

Banyak hal yang harus dibenahi oleh yayasan tentang pengaturan inter-

nal organisasinya *(internal governance)*. Undang-undang ini sangat rigis dan detail dalam pengaturannya tentang urusan internal organisasi, mulai dari struktur baku organ yayasan, pengangkatan. pemberhentian organ-organ yayasan, hingga kuorum rapat telah ditentukan aturan mainnya secara spesifik.

Dari segi struktur saja misalnya, sudah ditentukan bahwa organ yayasan terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Jadi mulai sekarang yayasan harus berbenah, lupakan struktur lama seperti Dewan Penyantun, Dewan Pendiri ataupun bentuk Struktur lain yang ditentukan masing-masing yayasan pada masa lalu. Diantara organ yang ditentukan ini juga dilarang untuk terjadi suatu rangkap jabatan satu sama lain antara pembina, Pengurus, ataupun Pengawas.

Satu contoh lagi hal internal organisasi yang harus dibenahi ialah mengenai masalah gaji. Organ yayasan (Pembina. Pengurus, dan Pengawas) dilarang oleh undang-undang ini untuk menerima gaji. Dalam penjelasan tertulis bahwa undang-undang ini mengharapkan organ yayasan untuk bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap. Sistem yang berlaku untuk tingkatan organ yayasan ini ialah sistem penggantian *(reimbursement)* terhadap segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan organ yayasan dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian larangan menerima gaji ini tidak berlaku bagi karyawan yayasan. Adalah sangat wajar, bahkan wajib, bagi yayasan untuk membayar gaji ataupun honor bagi karyawannya.

Berbagai aktivitas strukturisasi organisasi yayasan tersebut daslam aturan legal berarti penyesuaian anggaran dasar yayasan. Khusus untuk itu. UU Yayasan memberikan jangka waktu lima tahun sejak undasng-undang ini mulai berlaku yang berarti penyesuaian paling lambat dilakukan 6 Agustus 2007.

4. PEMBENAHAN "BISNIS " YAYASAN

Bisnsi dalam konteks yayasan sebenarnya dimaksudkan sebagai salah satu aktivitas *fund raising* yang bertujuan agar yayasan dapat mengembangkan kegiatan sosialnya tanpa perlu tergantung lagi kepada donasi dari para donatur sebagaimana banyak terjadi pada yayasan di Indonesia. Ada dua "jalur" bisnis yang diberikan oleh UU Yayasan ini. Jalur pertama ialah dengan mendirikan badan usaha, dan jalur kedua adalah dengan melakukan penyertaan.

Dalam jalur pertama, kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Hal ini mengakibatkan yayasan tidak bisa lagi mendirikan berbagai macam badan usaha yang kegiatannya seringkali tidak berkaitan dengan maksud dan tujuan

yayasan itu sendiri. Apabila hendak melakukan bisnis yang lintas dalam melakukan penyertaan, yayasan tidak dibenarkan melakukan penyertaan lebih dari 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Selain batasan-batasan tersebut, ada beberapa batasan umum yang megatur tentang kegiatan usaha yayasan batasan yang paling umum ialah bahwa hasil kegiatan usaha dari berbagai bisnis yayasan tersebut tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, ataupun Pengawas Yayasan. hasil dari kegiatan usaha yayasan haruslah diinvestasi kembali kepada yayasan untuk pengembangan pelaksanaan maksud dan tujuan yayasan. Selain itu juga ada larangan perangkapan jabatan antara organ yayasan dengan direksi ataupun komisaris pada perusahaan yang didirikan yayasan ataupun pada perusahaan dimana yayasan melakukan penyertaan.

Melihat dari berbagai aturan main dalam praktek bisnin yayasan yang diatur dalam UU Yayasan ini, dapat diprediksi akan diperlukan banyak pemberesan yang dilakukan oleh yayasan-yayasan di Indonesia. Terlebih jika kita mencermati berbagai penyimpangan yang bisa terjadi pada banyak yayasan. Masalah perangkapan jabatan antara pengurus yayasan banyak yayasan di negeri ini. Belum lagi tentang pembatasan penyertaan sebesar 25% yang diatur UU yayasan. sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak yayasan yang bahkan adalah PT yang berkedok yayasan.

5. Menyiapkan Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Yayasan

Satu hal yang pasti harus disiapkan oleh yayasan dalam mempersiapkan yang terkait dengan akuntabilitas publik ialah sebuah papan pengumuman di kantor yayasan. Hal ini disebabkan karena UU yayasan mewajibkan semua yayasan, tanpa terkecuali, untuk mengumumkan ikthisar laporan tahunannya pada papan pengumuman di kantor yayasan.

Selain kewajiban yang berlaku bagi yayasan yang menerima bantuan lebih dari 500 juta rupiah atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf lebih dari 20 milyar rupiah, ada kewajiban tambahan berupa audit oleh akuntan publik dan kewajiban untuk mengumumkan ikhtisar laporan tahunannya di surat kabar harian.

Bahkan bagi yayasan yang sebagian kekayaan berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunannya pada peraturan perundang-undangan, wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunannya pada papan pengumuman di kantor yayasan, yang mencakup kekayaan selama 10 tahun seblum undang-undang ini diundangkan.

Terkait dengan sistem akuntansitas publik di atas. praktek akuntabilitas dan transparansi yayasan tersebut memerlukan dukungan sistem akuntansi yang memadai. Selain kewajiban dokumentasi keuangan, dalam membuat

ikhtisar laporan tahunan juga telah ditentukan bahwa bentuk ikhtisar laporan tahunan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Standar akuntansi keuangan yang digunakan bagi organisasi nirlaba tertuang dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK-45) yang telah mulai efektif berlaku sejak 1 Januari 2000 lalu. Mengingat pentingnya peranan suatu sistem akuntansi yang memadai, sekarang saatnya kita bertanya pada akuntan yayasan kita masing-masing, apakah mereka sudah menguasai PSAK 457.

Pengaturan akuntabilitas publik dan sistem akuntasi yayasan ini dimaksudkan agar yayasan tidak tersaing dari publiknya. Publik merupakan *stakeholder* utama dari sebuah yayasan. Yayasan merupakan lembaga yang "memproklamirkan" dirinya sebagai entitas yang mengabdi bagi publik, sehingga kerjasama saling membangun dan transparan antara yayasan dan masyarakat merupakan syarat wajib bagi aktivitas sosial itu sendiri.

Demikanlah beberapa rumusan pemikiran penulis mengenai hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan dibenahi oleh yayasan-yayasan dalam rngka menghadapi berlakunya UU Yayasan pada 6 Agustus 2002 ini. Mengingat banyaknya kekurangan yang terdapat dalam undang-undang ini, terlebih lagi pembentukannya yang tidak partisipatif, pada kesempatan ini penulis ingin mengajak pembaca untuk menyingkapi UU Yayasan ini secara kritis dan melakukan berbagai macam tindakan untuk mewujudkan perbaikan perbaikan terhadap undang-undang ini.

Dipersiapkan untuk seminar "Antisipasi Organisasi Masyarakat Sipil atas Pemberlakuan UU Yayasan" yang diselenggarakan oleh Yappika dan Yayasan Tifa di 6 Wilayah (Yogya, Surabaya, Lampung, Aceh, Medan dan Makasar) Juni 2002.

Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)

XII. PERKEMBANGAN YPKP 1965/1966 MENJADI LPKP-65

Pada agnggal 27 April 2001 diadakan Seminar tentang UU No. 16/2001 (UU Yayasan) di Gedung YLLTK Jakarta yang dihadiri diantaranya:

1. Pak Sutomo (Mantan Menteri Perburuhan)-Ketua Partindo; beliau adalah mantan Menteri perburuhan RI yang terakhir pada pemerintahan Soekarno.
2. Ibu SK. Trimurti (Mantan Menteri Perburuhan Pertama pada Pemerintahan Soekarno).
3. Pak Tjasman, pimpinan LPKORP.
4. PRD
5. S.N.B
6. ELSAM (Lembaga Srtudi Advokasi Masyarakat).
7. LSM-LSM yang bergerak dibidang hukum dan Advokasi.
8. LSM-LSM yang bergerak di bidang Perjuangan HAM.
9. Dan lain-lain.

Termasuk Pak Heru Admadja dan organisasi-organisasi/ Lembaga – lembaga Perjuangan secara umum tidak bisa menerima UU No.16 /2001 dengan alasan; UU No.16/2001 tersebut adalah diambil dari draf yang telah dibikin pada tahun 1976 atas pesanan IMF. Disamping itu tidak demokratis dan sangat otoriter yang bisa berdampak negatif bila digunakan sebagai kendaraan lembaga Perjuangan untuk itu menyarankan sebaiknya menggunakan lembaga yang demokratis, karena di yayasan yang ada hanya relawan yang tak memiliki hak suara.

Kesimpulan dari Seminat tersebut, setuju menggunaan kendaraan yang lain. Maka teman-teman perwakilan dari daerah-daerah tingkat satu yang hadir (14 perwakilan) setuju untuk tidak menggunakan kendaraan YAYASAN (YPKP) tapi memilih LPKP-1965, karena dinilai Yayasan (UU No.16/2001) itu hanya cocok untuk sosial dan keagamaan.

Pada Malam harinya diadakan pertemuan khusus yang hadir dari teman-teman 14 provinsi (perwakilan daerah tingkat I) yang intinya adalah bersepakat untuk meninggalkan kendaraan perjuangan yang bernama YAYASAN dan berganti kendaraan perjuangan yang bernama LPKP-1965 (LEMBAGA PENELITIAN KORBAN PERISTIWA 1965).

Kemudian Ibu Sulami ditunjuk sebagai formatur untuk menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat LPKP 1965. Selain itu juga disiapkan siapa-siapa dari daerah-daerah yang duduk sebagai badan Pendiri. Sekaligus dibicarakan tentang anggaran dasar yang utama, yaitu: Pimpinan Pusat adalah

ditentukan oleh Kongres, sedangkan lain-lainnya disusulkan pada saat mendatangi Notaris.

Selanjutnya lahirlah Akte Notaris LPKP 1965 yang kelahirannya tepat pada tanggal 1 Mei 2002 terlampir.

Sesudah Kepengurusan LPKP 1965 Terbentuk (Pusat)

Ibu Sulami berpesan kepada generasi muda LPKP 1965 sebagai berikut:

"Kepada teman-teman yang muda (generasi muda) di lingkungan LPKP 1965, khususnya yang duduk di dalam kepengurusan LPKP 1965 Pusat, sekarang inilah saatnya kalian banyak belajar, dan LPKP inilah lahan/tempat belajar khususnya tentang Hak Asasi dan Demokrasi, mumpung saya beserta yang tua-tua lainnya masih hidup dan masih bisa mendampingi anda, mengingat perjalanan perjuangan kita masih memerlukan waktu panjang, dan kini bisa dimulai dan saya akan mendampingi kalian". Demikian pesanIbu Sulami. Kemudian generasi muda LPKP 1965, melakukan dialog/ perundingan khusus dengan dengan Martha Mejer Gedung PGI Jakarta membahas masalah kontrak kerja dengan HOM (Humanistishch Overleg Mensenrechten), pada tanggal 18 Juni 2002, diman akhirnya Martha Majer menyatakan bahwa prosedur penandatanganan kerja sama kontrak (YPKP 65/66 dengan HOM di Belanda) tersebut tidak sah.

Goa Tikus Saksi Sejarah Kelam Blitar Selatan

Tanggal 23 Agustus 2002 di Desa LOREJO

Yayasan Ksut Perdamaian (YKP) bersama Lembaga penelitian Korban Peristiwa 1965 (LPKP-65) dan Panitia pemugaran Luweng Tikus, Kedunganti, Blitar, lewat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) mendesak Negara menguburkan seluruh Korban pembunuha massal tahun 1965 secara layak dan manusiawi. Ketua Dewan Pengurus YKP Ester Indahyani Yusuf mengemukakan hal itu ketika bertemu dengan anggota Komnas HAM BN Marbun di ruang pengaduan kantor Komnas HAM Jakarta Rabu 28 Agustus 2002. Dalam kesempatan itu ditayangkan rekaman temuan tulang belualang korban di Luweng Tikus. Hasil temuan sementara empat kerangka manusia, saksi serta dukungan foto peristiwa tahun 1968.

Kasan Basri, salah seorang saksi yang ikut hadir menjelaskan bagaimana korban dibawa dari satu tempat ke Luweng (lubang) Tikus oleh truk-truk militer. "Korban menghadap bibir Luweng kedua jempol (ibu jari tangan) korban diikat tentara, yang membelakangi korban memukul leher belakang korban sampai sekarat. Sementara korban yang sudah sekarat itu, kaki tentara mendorong tubuh korban jatuh ke lobang. Begitu seterusnya" papar Kasan.

Mengutip keterangan beberapa saksi sekurang-kurangnya ada 41 korban yang terkubur di Luweng Tikus.

Marbun mengatakan "Memang sudah menjadi selayaknya korban dikebumikan secara manusiawi." Menurut Marbun bila tuntutan YKP, LPKP dan Panitia Pemugaran Cuma sebatas pengurburan yang layak bagi para korban KOMNAS HAM bersedia membantu. "Tetapi kalau dikait-kaitkan lagi dengan pelanggaran HAM, yahh... wah, berat itu itu karena menyangkut lebih dari sejuta korban tewas", ujarnya. Berikut gambar/ posisi Luweng Tikus terlampir

(Kompas 29/8/2002)

XIII. IBU SULAMI DIPANGGIL OLEH YANG MAHA KUASA

(Tanggal 8 Oktober 2002)

Pada tanggal 8 Oktober 2002 jam 00.15 IBU SULAMI telah dipanggil menghadap Tuhan Yang maha Kuasa, di Sragen, jawa Tengah. Sebelum meninggal, rupanya IBU SULAMI merasa bahwa kondisinya sudah menurun/ kurang baik, kemudian minta supaya dikirim kembali ke daerah kelahirannya, Sragen Jawa Tengah, maka pada tanggal 4 Oktober 2002 Ibu Sulami diantar kembali ke Sragen dari Jakarta, dalam keadaan sudah menurun kesehatannya.

Sepeninggal Ibu Sulami, betul-betul bagi keluarga LPKP 1965 kehilangan seorang pejuang yang gigih dan mempunyai prinsip perjuangan yang jelas dan konsisten, sekalipun kondisinya telah digerogoti oleh usia dan penurunan kesehatan (penyakit). Otaknya sangat sangat cemerlang dan yang penting sosok SULAMI adalah dekat dengan akar rumput organisasi, dan selalu terbuka, toleran, suka menerima pendapat dari bawah. Dan yang sangat menonjol Ibu Sulami sangat rendah hati dan sangat menghargai pihak lain (organisasi-organisasi/LSM-LSM lain) membuka lebar-lebar dalam kerjasama baik yang bersifat nasional maupun internasional. Nama beliau sangat dikenal oleh generasi muda yang ingin perubahan yang lebih maju, lebih baik demi kepentingan bangsa dan negara.

Tutur kata beliau sangat sejuk, dan mudah dipahami, tidak ada kesan menggurui, memaksakan ataupun menyudutkan orang yang sedang berhadapan dengan beliau.

Demikianlah sekilas tentang Perjalanan Hidup Ibu Sulami, seorang sosok yang sepenuh hidupnya diabdikan demi perjuangan, terutama hal yang menyangkut Hak Asasi khususnya dan demokrasi pada umumnya...Semoga amal bhakti beliau diterima disisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

*****

YALE UNIVERSITY LIBRARY
3 9002 07032 6591

AM 0147512 Code I-2003-410180

09 YALE UNIVERSITY LIBRARY

Dear Sulami

Saya baru menonton film yang dibuat orang Australia bernama "INDONESIA'S KILLING FIELDS". Saya sungguh kagum dengan keberanian SULAMI untuk memunculkan dirinya dalam pekerjaan yang mulia ini. Salam hangat dari saya untukmu.

Bagaimana kelanjutan pekerjaan Yayasan? Apakah penelitian masih diteruskan dan diam tempat-tempatnya?

Saya juga ingin tahu tentang publikasi buku memorimu. Seingat saya, saya pernah mengusulkan agar bagian tertentu diperdalam isinya., terutama bab yang mengenai pengadilan. Bagaimana pendapatmu? Sebaiknya dijelaskan mengenai bagaimana tuduhan-tuduhan dan apakah ada saksi yang dihadirkan, juga siapa yang menjadi adanya usaha-usaha yang begitu brutal untuk meyakinkan orang bahwa Gerwani adalah suatu organisasi yang amoral.

Kami di sini sangat sibuk mengikuti perkembangan-perkembangan di Timor-Timur dalam menghadapi jajak pendapat PBB. Saya khawatir bahwa usaha TNI akan membuat peristiwa itu sebagai suatu yang memukul hak-hak Rakyat Timor-Timur yang begitu lama menderita di bawah kekuasaan Indonesia. Keadaan di Aceh juga sangat memilukan bukan?

Ya, militer sudah tidak bisa merubah kebiasaan mereka untuk membunuh dan melakukan represi terhadap orang-orang yang melawan.

Sulami, saya mengharap sekali kabar darimu mengenai keadaan kehidupanmu dan teman-teman lain karena rindu saya terhadap kalian. Bagaimana hubungan lewat email? Baik sekali kalau bisa diteruskan.

Sewaktu Pramudya berada di Washington, saya sempat bertemu, karena kebetulan saya berada di situ untuk menghadiri konfrensi mengenai Aceh.

Sekian saja kabar dari saya untukmu
Salam dari London
Carmel

YALE

Cop 10/7/01 pd